

**PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN
KEDIRI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**M. ANAS AZHARY
NIM. 125030607111013**



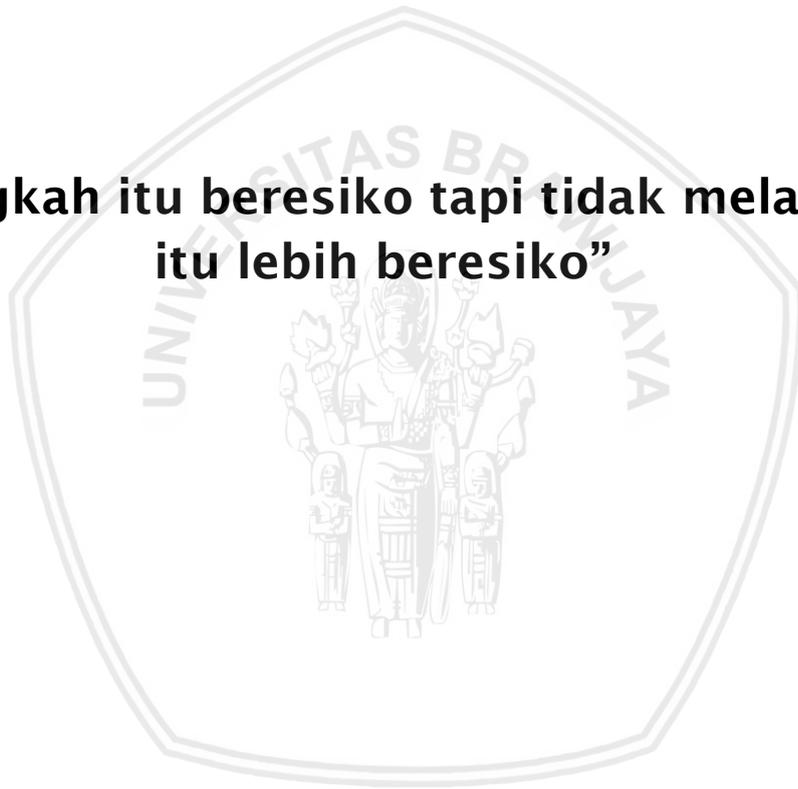
Dosen Pembimbing

- 1. Dr. Tjahjanulin Domai, MS**
- 2. Dr. Siswidiyanto, MS**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MALANG
2019**

Motto

**“Melangkah itu beresiko tapi tidak melangkah
itu lebih beresiko”**



Kupersembahkan Karya ini kepada

Kedua Orangtuaku

Dan Saudara-Saudariku

Almamater ku

FIA – Universitas Brawijaya





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri

Disusun oleh : M. Anas Azhary

NIM : 125030607111013

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Minat : Perencanaan Pembangunan

Malang, 17 MEI 2019

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota


Dr. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 19531222 198010 1 001


Dr. Siswidiyanto, MS
NIP. 19600717 198601 1 002

* laporan ini dibuat 2 lembar :

1. Program Studi

2. Matriks



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Juni 2019
Jam : 08.00 - 09.00 WIB
Skripsi Atas Nama : M. Anas Azhary
Judul : Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua


Dr. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 19531222 198010 1 001

Anggota


Dr. Siswidiwanto, MS
NIP. 19600717 198601 1 002

Anggota


Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP
NIP. 19531113 198212 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO.20 Tahun 2003, pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 11 Juni 2019



M. Anas Azhary
NIM. 125030607111013

RINGKASAN

M. Anas Azhary, 2019, **PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEDIRI**. Skripsi Jurusan Administrasi Publik. Minat Perencanaan Pembangunan, Pembimbing (1) Dr. Tjahjanulin Domai, MS (2) Dr. Siswidiyanto, MS

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun. Renja SKPD sendiri dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya. Namun adakalanya masalah dan hambatan seringkali di jumpai yang terjadi pada pelaksanaannya, dalam hal ini hambatan pada umumnya akan dijumpai pada pelaksanaan proses penyusunan Renja SKPD.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini di lakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri.

Hasil penelitian ini yang menjadi fokus peniliti terkait pembahasan mengenai Proses Pelaksanaan Penyusunan Renja SKPD Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambatan dalam proses pelaksanaannya. Terkait proses tahapan dan tatacara penyusunan Renja diantaranya; tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum, penetapan Renja dan aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyusunan tersebut. Dengan adanya pelaksanaan Renja SKPD tersebut, maka masyarakat dan pemerintah daerah akan menjadi bagian terpenting dari pada tersusunnya suatu tujuan tersebut sehingga dengan kata lain keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah merupakan suatu faktor pendukung dalam proses penyusunan Renja SKPD ini, namun adakalanya sering ditemukan juga hambatan-hambatan seperti: Belum optimalnya jaringan kerjasama dan koordinasi antar sektor, dan masyarakat Pelaksanaan pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang yang belum maksimal. Berbenturnya kebijakan politik kepala daerah dengan kehendak masyarakat yang berbeda.

Proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri diperlukan perbaikan dalam sosialisasi kepada masyarakat terkait program yang akan dibuat serta komunikasi harus ditingkatkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri.

Kata Kunci : Proses Penyusunan Rencana Kerja

SUMMARY

M. Anas Azhary, 2019, **PROCESS FOR PREPARING THE WORK PLAN OF TOURISM AND CULTURE OF KEDIRI DISTRICT**. Thesis Department of Public Administration. Interest in Development Planning, Advisor (1) Dr. Tjahjanulin Domai, MS (2) Dr. Siswidiyanto, MS

Annual Development Plan for Regional Work Units (SKPD Renja), is a planning document for the Regional Work Unit for 1 (one) year. SKPD Renja itself is intended to make changes towards a better direction for a community, government and its environment in certain regions / regions by utilizing or utilizing various resources. But sometimes problems and obstacles are often encountered that occur in the implementation, in this case the obstacles in general will be found in the implementation of the SKPD Renja preparation process.

This research uses descriptive research with a qualitative approach. This research was conducted at the Tourism and Culture Office of Kediri Regency. The types of data are used for primary data and secondary data. Primary data obtained from interviews, while secondary data obtained from documents that owned by the Tourism and Culture Office and Regional Development Planning Agency of Kediri Regency.

The results of this study focused on the researchers that related to the discussion of the Implementation Process of work plan Arrangements in the Tourism and Culture Office of Kediri Regency and the factors that become supporters and inhibitions in the implementation processed. Including the processes and procedures for preparing the work plans; there are mentioned the preparation stage of preparation, drafting, implementation of the forum, determination of drafting works and the actors involved in the drafting process. With the implementation of the work plans, the community and regional government will become the most important part of the purpose so that in other words community involvement in regional development is supporting some factors in the process of drafting this SKPD Work Plan, but sometimes obstacles are also found such as: not optimal network of cooperation and coordination between sectors, and the community Implementation of participatory approaches in planning through the musrenbang mechanism that has not been maximized. The clash of regional head's political policies with different people's will.

The process of formulating the work plan of the Kediri Regency Culture and Tourism Office required improvements in socialization to the community regarding the program to be made and communication must be improved by the Kediri Regency Culture and Tourism Office.

Keywords: Work Plan Preparation Process

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas kuasanya dan Rahmat-Nya kepada peneliti, sehingga skripsi tentang “ **PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEDIRI** dapat terselesaikan dengan baik oleh peneliti. Penelitian skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti juga menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Dr.Hermawan, S.IP, M.SI selaku Ketua Program Studi Perencanaan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Erlita Cahyasari, S.AP, M.AP selaku Sekretaris Program Studi Perencanaan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Dr. Tjahjanulin Domai, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai.
5. Dr. Siswidiyanto, MS selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya atas semua ilmu pengetahuan dan motivasi yang telah diberikan selama menempuh perkuliahan di Fakultas Ilmu Administrasi.
7. Seluruh Pihak Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Kediri yang bersedia merekomendasikan peneliti mengadakan penelitian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri.
8. Seluruh Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri yang bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam mendukung penyelesaian skripsi ini.
9. Terima Kasih Bapak Ismanurahim dan Ibu Komariyah selaku orang tua, Andy Abdilah saudara peneliti Yeni Arisa saudari peneliti dan Hafida Arofah saudari peneliti dan semua keluarga besar yang telah mendukung dan mendoakan peneliti menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Tamat Saifudin, Bude Nul, dan Mbak Azizah Badriah Yang telah memberikan dukungan dan masukan positif.
11. Teman-teman Prodi Perencanaan Pembangunan Angkatan 2012 atas semua kebersamaan dalam menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Administrasi.
12. Keluarga Besar Kos MT. Haryono 11 No. 356 Gang Keramik, Kakak tingkat yang selalu memberikan masukan positif dan segala isi ceritanya

13. Keluarga Besar Kos Jln. Gajayana Bpk Dolah yang selalu memberi motivasi dan Anggelio Berlian, Andy Amyrul yang dulu atas semua dukungan dan doa yang diberikan kepada peneliti.
14. Keluarga Besar Gampang Baper Malang, Sigid, Weldy, Ranggantara, Miko, Agus, Tino, Bayu Nirwana, Rifqi.
15. Brother from another mother, Teman, sahabat juga saudara terbaikku Malang
16. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya, semoga di Berkati Tuhan Yang Maha Esa.

Peneliti menyadari dalam penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan baik secara materil maupun penyajian, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan Saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juni
2019

Peneliti

DAFTAR ISI

COVER	I
MOTTO	II
HALAMAN PERSEMBAHAN	III
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	IV
TANDA PENGESAHAN	V
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	VI
RINGKASAN	VII
SUMMARY	VIII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR GAMBAR	XII
LAMPIRAN	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Proses Penyusunan Perencanaan.....	13
B. Perencanaan Pembangunan.....	14
1. Pengertian Perencanaan Pembangunan.....	14
2. Peran Pemerintah dalam Pembangunan.....	18
3. Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan.....	20
4. Pentingnya Perencanaan Pembangunan.....	23
C. Proses Penyusunan Rencana Kerja	26
D. Rencana Kerja	27
1. Program.....	30
2. Proyek	32
3. Kegiatan	34
4. Indikator Kinerja.....	36
E. Konsep ODTW (Obyek dan Daya Tarik Wisata)	40
F. Pengertian Pembangunan Pariwisata	45

G. Pariwisata	46
1. Pengertian Pariwisata	46
H. Pengembangan Pariwisata.....	49
I. Dasar Pengembangan Pariwisata	55

BAB III METODE PENELITIAN 60

A. Jenis Penelitian.....	60
B. Fokus Penelitian	61
C. Lokasi dan Situs Penelitian	63
D. Jenis dan Sumber Data	64
E. Teknik Pengumpulan Data	65
F. Instrumen Penelitian.....	67
G. Analisis Data	68

BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN..... 71

A. Gambaran Umum dan Situs Penelitian	71
1. Gambaran Umum Kabupaten Kediri	71
2. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Kediri	74
3. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kediri ...	76
4. Landasan Hukum	78
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	100
1. Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kediri Tahun 2017.....	100
a. Tahapan Persiapan Penyusunan	100
b. Tahapan Penyusunan Rancangan Renja.....	114
c. Pelaksanaan Forum Musrenbang	115
d. Penetapan Rencana Kerja.....	121
e. Aktor yang terlibat dalam Penyusunan Renja.....	123
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Proses Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kediri.....	125
a. Faktor Pendukung.....	125
b. Faktor Penghambat.....	128
C. Pembahasan.....	130
1. Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kediri.....	130
a. Tahapan Persiapan Penyusunan	131
b. Tahapan Penyusunan Rancangan Renja.....	138
c. Pelaksanaan Forum Musrenbang	141
d. Penetapan Rencana Kerja.....	143

e. Aktor yang terlibat dalam Penyusunan Renja.....	144
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Proses Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kediri	147
a. Faktor Pendukung.....	147
b. Faktor Penghambat.....	151
BAB V PENUTUP	154
A. KESIMPULAN.....	154
B. SARAN	158

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



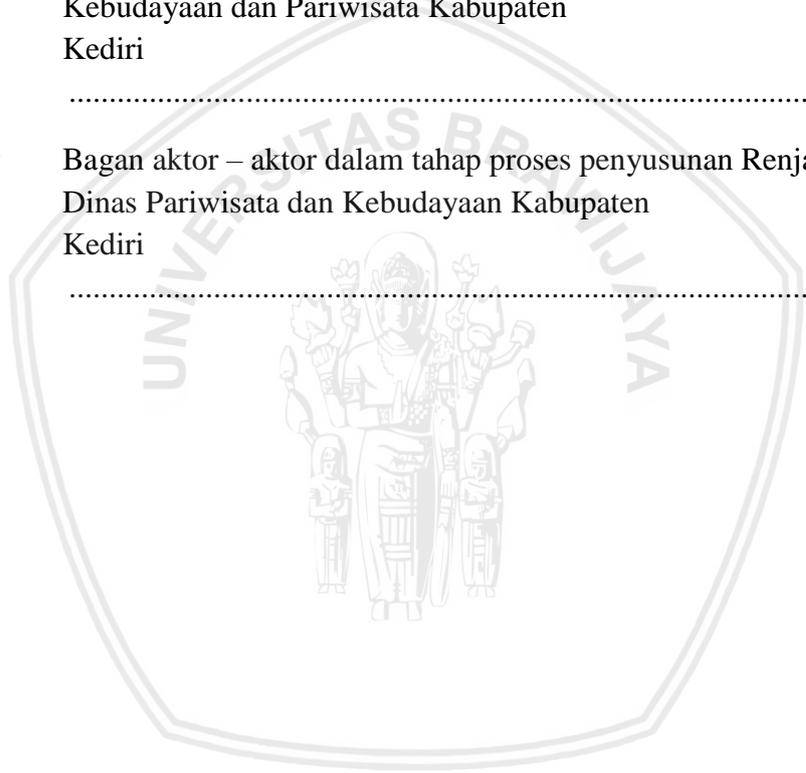
DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tabel Evaluasi LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri 2016	102
Tabel 4.2	Rancangan Awal RKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri 2016	104
Tabel 4.3	Usulan Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kediri 2017	117
Tabel 4.4	Aktor-aktor yang terlibat dalam Proses Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri 2019	124



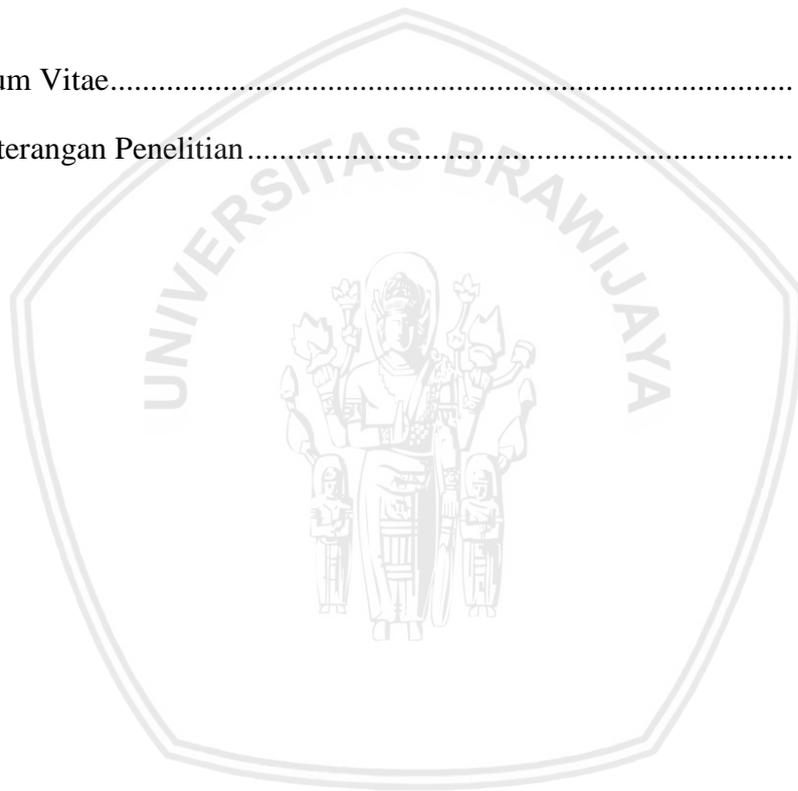
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Model Analisis Data Interaktif	64
Gambar 4.1	Formulir Penetapan Kinerja atau Penetapan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri	116
Gambar 4.2	Bagan aktor – aktor dalam tahap proses penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri	135



LAMPIRAN

Curriculum Vitae.....	162
Surat Keterangan Penelitian.....	163



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti perkembangan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan (Waterson dalam Tjokroamidjojo, 1984). Perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan agar pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Adapun beberapa unsur pokok dalam perencanaan pembangunan diantaranya adalah strategi dasar rencana pembanguan, adanya kerangka rencana, perkiraan sumber-sumber pembangunan, dan adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan. (Tjokroamidjojo, 1985). Berdasarkan unsur-unsur yang tersedia dalam perencanaan pembangunan, setiap pelaku pelaksana pembangunan harus memprioritaskan pembangunannya agar tercipta pengoptimalisian terhadap pencapaian sasaran pembangunan, pembangunan daerah sangat dibutuhkan untuk memprioritaskan berbagai rencana pembangunan di masing-masing daerah.

Pembangunan daerah dipandang sebagai suatu kegiatan yang utuh baik dimensi maupun pelakunya. Oleh karena itu, pembangunan daerah merupakan kegiatan untuk memperbaiki pembangunan sumber daya demi kesejahteraan daerah yang bersangkutan. Kewajiban pemerintah daerah untuk

mengelola sumber daya yang dimiliki agar menjadi sumber daya yang menarik dan bermanfaat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.

86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam kaitannya dengan pembangunan daerah, Riyadi dan Bratakusumah (2004) mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas. Untuk mewujudkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang baik, perlu adanya penyusunan suatu rencana strategis.

Rencana Strategis merupakan perencanaan jangka panjang yang bersifat umum dan di dalamnya mencakup pengembangan misi organisasi,

serta tujuan-tujuan pokok yang akan dicapai organisasi secara keseluruhan. Menurut Steiss dalam Salusu (2004), Perencanaan strategis merupakan komponen manajemen strategis yang berguna untuk memperjelas tujuan dan sasaran, memilih berbagai kebijakan, terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya, serta menciptakan pedoman dalam menerjemahkan kebijakan organisasi. Renstra memuat kebijakan pembangunan strategis dengan rinci dan terklasifikasi dengan tujuan mampu mewujudkan visi pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka mewujudkan suatu perencanaan strategis yang baik, pemerintah daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan.

Renja SKPD menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tupoksinya. Sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari renstra SKPD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP), Renja SKPD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan. Adapun salah satu contoh Renja dinas yang ada adalah Renja Disbudpar, Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka perbaikan, pembaharuan dan peningkatan kualitas pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang didalamnya memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan berpedoman pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa Renja memiliki fungsi sebagai alat yang digunakan didalam pembuatan program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021. Dapat disimpulkan selain melakukan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, perumusan kebijakan, fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pelaksana, Pembina, pengendalian, dan evaluasi. Rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri menghasilkan output program dan kegiatan diantaranya program kekayaan budaya daerah dan program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya, masing-masing kegiatan yang mengacu pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu peningkatan pentas seni dan budaya dan jumlah kelompok sadar wisata yang dibentuk sehingga Rencana kerja tidak terlepas dari adanya pengukuran

pencapaian kinerja, pencapaian kinerja digunakan untuk melihat seberapa jauh target dan sasaran dari program atau kegiatan yang telah tercapai atau terealisasi.

Untuk mendukung tercapainya kinerja instansi pemerintah yang telah di programkan, maka diperlukan adanya Renja SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Jika kembali pada peraturan Renja yang berlaku, Renja SKPD sendiri dirancang untuk periode 1 tahun kedepan dimana rancangan ini harus melalui proses yang sistematis, mulai dari tahap persiapan, penyusunan, pelaksanaan forum dan penetapan yang akan pelaksanaannya pada tingkat kabupaten.

Pada tahap persiapan dapat meliputi pembentukan tim penyusun Renja SKPD, orientasinya, penyusunan, pengumpulan data dan informasi. Kemudian ditahap penyusunannya akan melalui tahapan perumusan serta penyajian rancangan Renja SKPD. Selanjutnya itahap pelaksanaan forum, dimana merupakan wadah penampung dan penjangkaran aspirasi masyarakat berupa usulan usulan yang akan diajukan dan yang terakhir adalah tahap penetapan yang merupakan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah. Dalam keseluruhan tahapan tersebut pastinya terdapat beberapa kendala baik kendala dalam perencanaannya maupun kendala untuk merealisasikan Renja tersebut.

Dalam proses pembuatan dan perencanaan kerja, penulis menemukan adanya beberapa kendala yang terjadi baik kendala pada tahap persiapan, penyusunan, pelaksanaan forum dan juga tahap penetapan. Namun sesuai yang terjadi di lapangan menurut hemat penulis, bahwa kendala pada tahap pelaksanaan forumlah yang terlihat jelas adanya simpang siur dimana tujuan pelaksanaan forum adalah untuk menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, ini berdasarkan data yang penulis peroleh dari lapangan:

Tabel: 1.1 Daftar Usulan yang Belum Disetujui Musrenbang RKPD 2016 Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Jenis program/kegiatan	Lokasi	Alasan
1.	Alat kesenian tradisional	Ds. Canggu, Kec. Badas	Belum dianggarkan
2.	Pengadaan alat musik gamelan	Ds. Kepuhrejo, Kec. Gampengrejo	Belum dianggarkan
3.	Pengadaan alat musik gamelan	Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo	Belum dianggarkan
4.	Pengadaan alat musik gamelan	Ds. Plosorejo, Kec. Gampengrejo	Belum dianggarkan
5.	Pengadaan alat musik gamelan	Ds. Sambiresik, Kec. Gampengrejo	Belum dianggarkan
6.	Pengadaan alat musik gamelan	Ds. Bimbing, Kec. Gurah	Belum dianggarkan
7.	Pelatihan langen bekso	Ds. Bimbing, Kec. Gurah	Belum dianggarkan

8.	Pelatihan memainkan gamelan dan seni tari	Ds. Bimbing, Kec. Gurah	Belum dianggarkan
9.	Seragam jaranan	Ds. Sumberejo, Kec. Kandat	Belum dianggarkan
10.	Pembelian gamelan	Ds. Selosari Kec. Kandat	Belum dianggarkan
11.	Perlengkapan gamelan untuk jaranan	Dsn Tangkilan Kidul Ds. Padangan	Belum dianggarkan
12.	Pengadaan peralatan kuda lumping	Ds. Besowo, Kec. Kepung	Belum dianggarkan
13.	Revitalisasi sarana prasarana kesenian	Ds. Bumbung, Kec. Kepung	Belum dianggarkan
14.	Pengadaan peralatan kuda lumping	Ds. Kebonrejo	Belum dianggarkan
15.	Pengadaan peralatan karawitan	Ds. Setonorejo, Kec. Kras	Belum dianggarkan
16.	Pengadaan peralatan hadrah, jaranan dll	Ds. Kunjang, Kec. Kunjang	Belum dianggarkan
17.	Bantuan peralatan & pembinaan kesenian jaranan dan tiban	Ds. Surat, Kec. Mojo	Belum dianggarkan
18.	Pengembangan agrowisata durian	Ds. Bimbing, Kec. Mojo	Belum prioritas
19.	Pengadaan peralatan kesenian jaranan	Ds. Sempu, Kec. Ngancar	Belum dianggarkan
20.	Pembangunan situs semen	Ds. Semen, Kec. Pagu	Kajian dahulu & pernah mendapatkan
21.	Alat kesenian jaranan	Ds. Mejono, Kec. Pelemahan	Belum dianggarkan

22.	Alat kesenian jaranan	Ds. Bogo, Kec. Plemahan	Belum dianggarkan
23.	Pemberian kelengkapan kesenian golo ganjur	Ds. Kawedusan, Kec. Plosoklaten	Belum dianggarkan
24.	Penyuluhan pengembangan kawasan wisata alam di lereng kelud	Ds. Puncu, Kec. Puncu	Belum prioritas
25.	Bantuan alat kesenian	Ds. Ringinrejo, Kec. Ringinrejo	Belum prioritas

Sumber : data diolah penulis dari dokumen usulan musrenbang (Bappeda) Kab.

Kediri

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa adanya beberapa faktor yang menjadi hambatan sehingga beberapa rencana atau usulan-usulan yang diajukan ternyata terhenti atau masih dalam tahap pertimbangan karena suatu alasan. Berdasarkan tabel tersebut faktor yang menyebabkan belum tercapainya target bisa jadi belum optimalnya serapan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan Renja SKPD melalui pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) yang sifat usulan-usulannya bersifat fisik dan kemampuan daerah untuk mewujudkan usulan tersebut belum bisa terlaksana, dan yang memungkinkan usulan tersebut tersebut akan diajukan ketingkat musrenbang tingkat provinsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan rencan kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri tahun 2015 dan apa yang menjadi faktor-faktor yang menjadi pendukung ataupun penghambatnya

jalannya proses penyusunan Renja SKPD tersebut dengan judul skripsi “PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KEDIRI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Proses Penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dari Proses Penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri.
2. Teridentifikasinya faktor penukung dan penghambat dari Proses Penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun yang menjadi kontribusi dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Akademis

Sebagai bahan diskusi serta masukan demi penyelenggaraan pembangunan dan ilmu pengetahuan, dalam studi mengenai Perencanaan Pariwisata dan keterkaitannya dengan Rencana Kerja dalam lingkungan instansi pemerintah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Organisasi

Sebagai bahan masukan bagi organisasi dalam proses penilaian Proses Penyusunan Rencana Kerja, Program dan kegiatan kedinasan lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri.

b. Bagi Penulis

- 1) Sebagai media penerapan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam masa studi perkuliahan.
- 2) Menambah wawasan keilmuan dalam keilmuan secara praktik di lapangan.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan referensi yang memberikan informasi untuk kepentingan penelitian lanjutan

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latarbelakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan kondisi teraktual mengenai proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang relevan sebagai landasan atau acuan dilakukannya penelitian, serta memiliki keterkaitan dengan judul penelitian. Bab ini mengandung materi mengenai perencanaan secara umum, Rencana Kerja (Program-Proyek-Kegiatan) Rencana Strategis serta Proses penyusunan Rencana Kerja yang merupakan subjek ini analisis dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi dan Situs Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian dan Analisis data. Bab ini membahas mengenai standar metode alat analisis yang digunakan peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang relevan guna memperoleh dukungan data yang akurat, sehingga mampu memberikan gambaran yang maksimal mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian meliputi penyajian data yang diperoleh selama masa penelitian yang merupakan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah, data hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan metode analisis yang telah ditetapkan oleh peneliti. Bab ini memberikan gambaran/ilustrasi hasil analisa data berupa gambaran umum lokasi penelitian, hasil wawancara, lampiran dokumen terkait penelitian serta informasi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pembahasan berdasarkan hasil penyajian data lapangan dan analisis teoritik dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Penyusunan Perencanaan

Secara lebih terperinci dapat dikemukakan tahap – tahap suatu proses perencanaan menurut (Tjokroamidjojo : 1981) sebagai tersebut :

a. Penyusunan perencanaan

Penyusunan perencanaan terdiri unsur – unsur :

1. Tinjauan keadaan, tinjauan keadaan dapat berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana atau suatu tinjauan tentang pelaksanaan rencana sebelumnya.
2. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana. Dalam hal ini diperlukan data – data statistik, berbagai hasil penelitian dan teknik – teknik proyeksi.
3. Penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara – cara pencapaian tujuan rencana tersebut.
4. Identifikasi kebijaksanaan dan kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana.
5. Tahap terakhir dari pada penyusunan rencana ini adalah tahap persetujuan rencana.

b. Penyusunan program rencana

Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci yang mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan sebagai bagian ataupun tidak dari pada program-program tersebut terdahulu

- c. Tahap berikutnya dalam proses perencanaan adalah pelaksanaan rencana.

d. Tahap berikutnya adalah dilakukan pengawasan dan pelaksanaan rencana, tujuan dari pengawasan adalah :

- 1) Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan perencanaannya
 - 2) Apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya.
 - 3) Dilakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan
 - 4) Dilakukan suatu sistem monitoring dengan mengusahakan pelaporan yang baik dari pada pelaksanaan rencana
- e. Dalam proses perencanaan perlu dilakukan pula evaluasi Evaluasi ini membantu pengawasan. Dalam hal ini dilakukan suatu evaluasi atau tindakan yang berjalan terus menerus.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan harus melalui tahapan-tahapan proses perencanaan sebelum menjadi dokumen atau kebijakan diantaranya tahap pertama penyusunan perencanaan, penyusunan program rencana, pelaksanaan perencanaan, pengawasan, dan yang terakhir evaluasi.

B. Perencanaan pembangunan

1. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan sebagai tahap awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*). Oleh karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Menurut (Tjokroamidjojo, 1985) perencanaan pembangunan adalah suatu

pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Sedangkan menurut Soejarto (dalam Wisuda, 2012) perencanaan merupakan suatu hasil rangkaian kerja untuk merumuskan sesuatu yang didasari oleh suatu pola tindakan yang definitif, menurut pertimbangan yang sistematis akan membawa keuntungan, tetapi dengan anggapan bahwa akan ada tingkatan selanjutnya yang juga merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis lainnya. Pada dasarnya kegiatan pembangunan memerlukan perencanaan. Hal tersebut dimaksudkan agar pembangunan lebih terarah dan juga untuk mempermudah dalam mengontrol dan mengevaluasi pembangunan.

Kata pembangunan secara sederhana sering diartikan sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Menurut Rogers (dalam Nasution, 2007) pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Jadi bisa disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dipilih

secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada.

Ketika menyusun suatu perencanaan pembangunan, maka ada lima hal pokok yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- a. Permasalahan dan potensi yang ada
- b. Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai
- c. Penetapan kebijaksanaan dan cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut
- d. Penerjemahan rencana kedalam bentuk program yang nyata.
- e. Persetujuan rencana. (Tjokroamidjojo, 1987)

Seringkali terdapat kesalahpahaman seakan-akan perencanaan berarti kegiatan menyusun rencana saja. Padahal perencanaan merupakan suatu proses kegiatan usaha terus menerus dan menyeluruh dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan serta pengawasan dan juga evaluasi. Menurut UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 8 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ada beberapa tahapan perencanaan, yaitu :

- a) Penyusunan rencana, meliputi
 - 1) Penyiapan rancangan awal perencanaan pembangunan
 - 2) Musyawarah perencanaan pembangunan, dan
 - 3) Penyusunan rancangan akhir perencanaan pembangunan
- b) Penetapan rencana, meliputi

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dengan Undang-Undang dan RPJP Daerah dengan Peraturan Daerah
 - 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dengan Peraturan Presiden dan RPJM Daerah dengan Peraturan Daerah.
 - 3) Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nasional dengan Peraturan Presiden dan RKP daerah dengan Peraturan Kepala Daerah
- c) Pengendalian pelaksanaan rencana, melalui:
- 1) Dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 - 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai tugas dan kewenangannya.
- d) Evaluasi pelaksanaan rencana.
- a) Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.
 - b) Kepala BAPPEDA menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD.

Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk daerah untuk periode berikutnya.

2. Peran Pemerintah dalam Pembangunan

Pada umumnya semakin terasa bahwa bagi negara-negara baru berkembang atau yang belum maju dibutuhkan peranan serta fungsi pemerintah yang lebih besar. Walaupun cara pelaksanaan dari peranan serta fungsi tersebut dapat berbeda-beda. Peran pemerintah sebagai unsur pembaharuan dan pendorong pembangunan (*development agent*) diakui, tetapi caranya bisa dilakukan melalui pengaturan pimpinan dalam suatu negara, atau pemberian kebebasan pada sektor swasta yang cukup besar, ataupun suatu usaha pembangunan berencana dimana pemerintah memberikan peranan dalam pengarahannya serta melakukan cara-cara tak langsung (dengan menggunakan banyak upaya melalui mekanisme pasar atau harga) (Tjokroamidjojo, 1984).

Peran pemerintah sebagai unsur pendorong pembangunan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut, menurut (Djamin, 1974) yang dikutip oleh (Tjokroamidjojo, 1984)

- a. Fungsi pengaturan: pemerintah berperan menentukan kebijakan pembangunan pemberian pengarahannya dan bimbingan, pengaturan melalui perijinan dan pengawasan.
- b. Fungsi pemilikan: pemerintah memiliki sendiri usaha-usaha pembangunan ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri oleh swasta.
- c. Fungsi penyelenggaraan: pemerintah menyelenggarakan sendiri semua kegiatan ekonomi atau sosial.

Selain itu, pendapat lain menurut Irving Swerdlow, yang dikutip oleh (Tjokroamidjojo, 1984), menyebutkan peran pemerintah dalam pembangunan adalah:

- a. *Direct opration*: pemerintah menjalankan sendiri (operasi langsung) kegiatan-kegiatan pembangunan.
- b. *Direct control*: pemerintah melakukan pengendalian langsung terhadap usaha-usaha pembangunan lewat perizinan, lisensi, penjatahan, dan penetapan harga dan sebagainya.
- c. *Direct influence*: pemerintah hanya memberikan pengaruh langsung dengan cara memberikan persuasi nasehat dalam usaha-usaha pembangunan.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli mengenai peran pemerintah dalam pembangunan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan sangat penting terutama bagi negara yang sedang berkembang dikarenakan peran pemerintah dalam pembangunan merupakan kunci agar masyarakat dapat menuju yang lebih baik. Peran pemerintah juga harus aktif dan positif karena pemerintah harus mempunyai sarana utama bagi rakyatnya terutama yang berkenaan dengan upaya meningkatkan tingkat taraf hidup atau tingkat kemakmuran masyarakat.

3. Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan

Mengingat akan begitu luasnya mengenai definisi dari suatu perencanaan, yang mana seringkali terjadi perbedaan di dalam mendefinisikannya, karena perbedaan perspektif (cara pandang), kajian

ilmu, dan juga beberapa faktor lainnya. Maka dengan ini dapat ditegaskan bahwa setiap kegiatan perencanaan belum tentu merupakan perencanaan pembangunan, karena ruang lingkup dari perencanaan yang sangat luas tersebut.

Untuk memudahkan dalam memahami mengenai apakah suatu perencanaan termasuk dalam lingkup perencanaan pembangunan, maka perlu diperhatikan karakteristik berikut ini yang merupakan ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan, yaitu:

- a. Suatu rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steady economic growth*)
- b. Usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita
- c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi
- d. Perluasan kesempatan kerja
- e. Usaha pemerataan pembangunan
- f. Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan
- g. Kemampuan membangun lebih didasarkan pada kemampuan sosial
- h. Terdapatnya usaha secara terus menerus dalam menjaga stabilitas ekonomi
- i. Ada pula negara-negara yang mencantumkan sebagai tujuan pembangunan hal-hal yang fundamental/ideal atau yang bersifat jangka panjang.
(Tjokroamidjojo, 1989)

Suatu perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai, pertama perencanaan pembangunan adalah usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steady economic growth*). Ini dicerminkan dari usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif. Kedua, adalah usaha yang dicerminkan dalam suatu perencanaan pembangunan yaitu untuk

meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita, kesejahteraan masyarakat akan semakin membaik. Ketiga, adalah bahwa perencanaan pembangunan menyangkut usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Ini sebabkan karena pada umumnya di negara-negara dunia ketiga (*under developing country*) struktur ekonominya cenderung ke arah sektor agraris. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan ketimpangan yang cukup besar antar sektor.

Oleh karena itu, lebih diusahakan agar lebih seimbang antara perkembangan sektor agraris dengan sektor lainnya, sehingga akan membawa implikasi terhadap keseimbangan struktur ekonomi. Keempat, ciri dari perencanaan pembangunan adalah adanya perluasan kesempatan kerja. Hal ini sering menjadi tantangan yang sangat berat yang dialami oleh negara-negara berkembang. Karena perluasan kesempatan kerja bukan berarti hanya usaha untuk menanggulangi pengangguran dan pengangguran tak kentara, tetapi juga menampung masuknya golongan usia kerja baru dalam dunia kerja dan kehidupan ekonomi. Kelima, usaha pemerataan pembangunan (sering disebut dengan *distributive justice*), adalah pemerataan yang ditujukan untuk pemerataan pendapatan anatar daerah.

Ciri selanjutnya adalah menyangkut usaha pembinaan lembaga-lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan. Berbagai lembaga ekonomi perlu dikembangkan, misalnya koperasi, lembaga keuangan dan lain-lain. Berikutnya yaitu perencanaan pembangunan adalah usaha sedemikian rupa supaya

kemampuan membangun secara bertahap lebih didasarkan pada kemampuan nasional. Peningkatan kemampuan tidak hanya dilihat dari segi modal saja, tetapi juga dari segi kapasitas sumberdaya manusianya. Ciri lainnya adalah usaha yang berkesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dan ciri yang terakhir adalah bahwasanya ada pada beberapa negara yang mencantumkan beberapa aspek fundamental dalam perencanaan pembangunan, misalnya pembangunan bangsa (*national building*) dan peningkatan kualitas hidup manusia.

Selanjutnya (Riyadi dan Bratakusumah, 2003) menyebutkan ciri-ciri dari perencanaan pembangunan daerah yang membedakannya dengan jenis perencanaan lainnya adalah:

- a. Menghasilkan program-program yang bersifat umum
- b. Analisis perencanaan bersifat makro/luas
- c. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang.
- d. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas
- e. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek (1 tahunan)

4. Pentingnya Perencanaan Pembangunan

Perencanaan mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama dalam suatu organisasi. Menurut (Handoko, 1999) mengatakan bahwa ada dua alasan dasar perlunya perencanaan, yaitu :

- a. Perencanaan dilakukan untuk mencapai *protective benefit* yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan.
- b. Perencanaan dilakukan untuk mencapai *positive benefits* dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi.

Winardi, 1989) juga menjelaskan pentingnya perencanaan karena perencanaan bersifat antisipatoris, karena ia mendahului tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, agar arah pembangunan dapat bergerak maju menuju tujuan yang diinginkan bersama maka dibutuhkan perencanaan. Pembangunan yang dilaksanakan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan yang baik, maka dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula dan sesuai dengan tujuan. Secara rinci (Wursanto, 1987) menyusun rumusan berkenaan dengan pentingnya perencanaan bagi lembaga, organisasi, maupun perusahaan yaitu:

- a. Dengan perencanaan digariskan tujuan organisasi sehingga geraknya dapat diarahkan
- b. Dengan perencanaan semua aktifitas lembaga, organisasi, usaha dapat diarahkan dalam satu arah tujuan yang telah ditetapkan.

- c. Dengan adanya perencanaan dapat diperoleh tindakan yang tepat dan terkoordinasi dari berbagai unit kerja.
- d. Dengan adanya perencanaan, berdasarkan penelitian, ramalan dan dugaan-dugaan yang objektif, berbagai situasu darurat dapat diperhitungkan.
- e. Perencanaan menjadi alat untuk menyesuaikan usaha dengan situasi dan kondisi yang berubah karena berbagai faktor.
- f. Perencanaan membantu menghadapi ketidakpastian masa datang dan menanggulangi akibat-akibat yang timbul karena terjadi perubahan-perubahan.
- g. Perencanaan dapat membantu dalam menentukan tindakan yang membawa ke tujuan.
- h. Perencanaan membantu efisiensi kerja
- i. Dengan perencanaan metode kerja dapat diperbaiki
- j. Perencanaan dapat membantu menghindari kesalahan dalam usaha
- k. Perencanaan penting bagi pimpinan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi manajerialnya
- l. Perencanaan menghemat tenaga manajemen
- m. Perencanaan memungkinkan delegasi kekuasaan dan pelaksanaan prinsip subsidiritas.
- n. Perencanaan dapat digunakan sebagai alat atau pedoman dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Dalam perencanaan terdapat tahap-tahap yang harus dilalui untuk mencapai tujuan, kemudian dapat diketahui faktor apa yang mendukung dan faktor apa yang menghambat. (Handoko, 1999) menyatakan bahwa semua kegiatan perencanaan pada dasarnya harus melalui empat tahap perencanaan, yaitu :

- a. Tahap 1 adalah menempatkan tujuan atau serangkaian tujuan
- b. Tahap 2 adalah merumuskan keadaan saat ini
- c. Tahap 3 adalah mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan
- d. Tahap 4 adalah mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan

Dari tahap-tahap perencanaan dapat disimpulkan bahwa untuk memudahkan dalam mencapai tujuan, maka diperlukan penyusunan tahap-tahap perencanaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dengan adanya perencanaan dapat diketahui tindakan apa yang perlu dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukan untuk perbaikan dimasa mendatang. Pada bagian ini peneliti akan mengulas lebih dalam mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi rencana kerja (RENJA).

C. Proses Penyusunan Rencana Kerja

Rencana pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah

untuk periode 1 (satu) tahun, (UU No 25 Tahun 2004). Proses penyusunannya yang meliputi beberapa tahapan dan tata cara penyusunan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan renja SKPD

Tahap persiapan penyusunan renja SKPD meliputi; pembentukan tim penyusun renja SKPD, orientasi mengenai renja SKPD, penyusunan agenda kerja, dan pengumpulan data dan informasi

b. Penyusunan rancangan renja SKPD

Renja SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang didalamnya terdapat proses penyusunan yaitu tahap perumusan rancangan renja SKPD dan tahap penyajian rancangan renja SKPD

c. Pelaksanaan forum SKPD

Forum SKPD merupakan wadah penampung dan penjangkaran aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan renja SKPD. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi. Dalam proses penyusunan renja SKPD pelaksanaan forum

konsultasi public dipisahkan antara kabupaten/kota dengan provinsi.

d. Penetapan renja SKPD

Penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, Selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

D. Rencana Kerja

Menurut UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Renja Kerja (Renja) SKPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Adapun salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut yaitu Dokumen

Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari renstra SKPD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP), Renja SKPD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD
2. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja RKPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap Renstra SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan

Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).

5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.
6. Program/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Renja –SKPD yang merupakan penjabaran Renstra SKPD berisikan mengenai :

1. Kebijakan SKPD
2. Program dan kegiatan pembangunan
 - a. Dilaksanakan pemerintah
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (www.slideshare.net)

1. .Program

Program adalah realisasi dari kebijakan yang merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dengan daya dukung berupa partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan program sangat erat kaitannya dengan kebijakan operasional instansi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kebijakan tingkat nasional/provinsi.

Program merupakan proses bagi penentuan jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan strategi suatu Renstra. Substansi program antara lain sebagai berikut :

- a. Merupakan rincian tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjabarkan setiap kebijakan organisasi.
- b. Memiliki masa jangka menengah dan jangka panjang antara 3 sampai 5 tahun, juga dapat bersifat tahunan mengenai waktu pelaksanaan.
- c. Melekat dan menjadi pedoman bagi setiap fungsi dari organisasi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Program adalah

penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Langkah-langkah dalam Penyempurnaan Program Pembangunan antara lain :

- a. Koordinasi Program Pembangunan
- b. Lingkup pusat dan nasional, koordinasi oleh lembaga/badan perencanaan pembangunan nasional
- c. Lingkup provinsi, koordinasi oleh lembaga/badan perencanaan pembangunan provinsi
- d. Lingkup kabupaten/kota, koordinasi oleh lembaga/badan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- e. Pengendalian Program Pembangunan.
- f. Pengendalian di tingkat nasional dan daerah, akan dilakukan secara koordinatif dengan melibatkan unsur-unsur perencanaan, pengendalian, pembinaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pendataan dan informasi, dengan pendekatan instrument kebijakan dan anggaran pembangunan di Pusat dan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga atau masyarakat yang dikordinasikan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

2. Proyek

Proyek adalah kegiatan-kegiatan yang dapat direncanakan dan dilaksanakan dalam satu bentuk kesatuan dengan mempergunakan sumber-sumber untuk mendapatkan benefit. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berbentuk investasi baru seperti pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Suatu proyek dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah, badan-badan swasta atau organisasi sosial maupun perorangan. Sumber-sumber yang dipergunakan dalam pelaksanaan proyek dapat berbentuk barang-barang modal, tanah, tenaga kerja, dan waktu. Proyek merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam satu bentuk kesatuan berarti bahwa baik sumber-sumber yang dipergunakan dalam satu maupun hasil-hasil proyek tersebut dapat dipisahkan dari sumber-sumber yang digunakan oleh dan hasil kegiatan lain. Dalam keberlangsungannya proyek tersusun atas beberapa tahap yaitu:

- a. Identifikasi, yaitu mengidentifikasi, yaitu menentukan bakal proyek yang perlu dipertimbangkan pelaksanaannya. Beberapa pegangan menyangkut perlu tidaknya suatu gagasan proyek diteliti lebih lanjut adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut :
 - Apakah proyek termasuk dalam sektor yang diprioritaskan
 - Apakah proyek secara garis besar akan memberikan *impact* positif
- b. Formulasi, yaitu mengadakan persiapan dengan melakukan prastudi kelayakan dengan meneliti sejauh mana bakal proyek

tersebut dapat dilaksanakan menurut aspek teknis, institusional, sosial dan eksternalitas.

- c. Analisis, yaitu mengadakan *appraisal* atau evaluasi terhadap laporan-laporan studi kelayakan yang ada. Studi kelayakan proyek tadi dianalisis untuk memilih yang terbaik diantara berbagai alternatif proyek yang ada, berdasarkan tolak ukur tertentu.
- d. Implementasi, tahap implementasi adalah tahap pelaksanaan proyek. Dalam tahap ini tanggung jawab utama dari para perencana serta penilai proyek terhadap pelaksanaan pembangunan fisik proyek agar sesuai dengan final design-nya.
- e. Operasi Proyek, pada tahap ini dipertimbangkan metode-metode pembuatan laporan atas pelaksanaan operasinya.
- f. Evaluasi Hasil, Berdasarkan laporan hasil operasi implementasi proyek disini diperbandingkan antara apa yang direncanakan dan hasil yang dicapai. Hasil evaluasi ini diperlukan untuk mengadakan perbaikan bagi proyek-proyek berikutnya atau mengembangkan gagasan baru dalam memilih proyek baru. (Gray, 1992)

3. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang

harus dilakukan oleh unit-unit kerja atau komponen organisasi dalam rangka merealisasikan program kerja operasionalnya sesuai Renstra bagi suatu organisasi. Kegiatan bersifat hal konkret, maka dalam merumuskan kegiatan harus SMART (specific, measurable, aggressive, but attainable, Result oriented dan Time bound), dan biasanya disebut dengan Lembaran Kerja. (Muljadi, 2006)

Menurut (Muljadi, 2006) rumusan kegiatan pada setiap program dirumuskan lebih dari satu atau minimal dua kegiatan. Kegiatan yang harus dilakukan setiap program, dengan memperhatikan :

- a. Kemampuan dana, yang dapat didukung oleh masyarakat, swasta, dan dana pemerintah (APBN/APBD). Kecermatan pemanfaatan sumber dana yang harus dioptimalkan manfaatnya (dana bisa jadi swadaya, pinjaman dalam negeri)
- b. Efisiensi berdasar atas pemilihan berdasar atas pemilihan alternatif. Kecermatan pemanfaatan sumber daya yang lain dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Pemakaian jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Penghitungan faktor secara cermat.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan

tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

Rencana kegiatan terdiri dari pilihan-pilihan organisasi atau instansi pemerintah untuk melaksanakan metode, proses, ketrampilan, peralatan dan sistem kerja dalam rangka mengimplementasikan program kerja yang telah dibuat dengan memperhatikan lingkungan yang ada dalam organisasi, baik lingkungan internal maupun eksternal.

4. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan implementasi

yang telah ditetapkan. Menurut (Lohman, 2003), indikator kinerja (performance indicators) adalah suatu variable yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi (dalam Mahsun,2006). Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Kriteria indikator kinerja antara lain : *output oriented measures* *throughput, efficiency, effectiveness*. Selanjutnya indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Efficiency* atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. *Effectiveness* atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. (Winarsih, 2005)

Salim dan Woodward dalam Ratmino dan Atik Septi Winarsih (2005:174) mengemukakan indikator kinerja antara lain : *economy, efficiency, effectiveness, equity*. Secara lebih lanjut, indikator tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. *Economy* atau ekonomis adalah penggunaan sumber daya sedikir mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

- b. *Efficiency* atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- c. *Effectiveness* atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.
- d. *Equity* atau keadilan adalah pelayanan public yang diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek pemeratan.

Mengukur kinerja birokrasi publik berdasar adanya indikator (Agus Dwiyanto, 2006) yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Produktivitas, Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office (GAO)* mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan public itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.
- b. Kualitas Layanan Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan

masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

- c. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- d. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.
- e. Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi public tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat.

Dalam hal ini, Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Sebaiknya Kinerja juga

mempedomani nilai-nilai dan norma kemasyarakatan. Bentuk kegiatan organisasi publik yang memiliki akuntabilitas yang tinggi dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

E. Konsep ODTW (Obyek dan Daya Tarik Wisata)

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Seorang wisatawan berkunjung ke suatu tempat/ daerah/ Negara karena tertarik oleh sesuatu yang menarik dan menyebabkan wisatawan berkunjung ke suatu tempat/ daerah/ Negara disebut daya tarik dan atraksi wisata (Mappi, 2001). Menurut Mappi (2001) Objek wisata dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu :

- a. Objek wisata alam, misalnya : laut, pantai, gunung (berapi), danau, sungai, fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam dan lain-lain.
- b. Objek wisata budaya, misalnya : upacara kelahiran, tari-tari (tradisional), musik (tradisional), pakaian adat, perkawinan adat, upacara turun ke sawah, upacara panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun

(tradisional), tekstil lokal, pertunjukan (tradisional), adat istiadat lokal, museum dan lain-lain.

- c. Objek wisata buatan, misalnya : sarana dan fasilitas olahraga, permainan (layangan), hiburan (lawak atau akrobatik, sulap), ketangkasan (naik kuda), taman rekreasi, taman nasional, pusat-pusat perbelanjaan dan lain-lain.

Sedangkan (Oka A. Yoeti, 1997) berpendapat bahwa berhasilnya suatu tempat wisata hingga tercapainya industri wisata sangat tergantung pada tiga A (3A), yaitu atraksi (*attraction*), mudah dicapai (*accessibility*) dan fasilitas (*amenities*).

1. Atraksi (*attraction*)

Atraksi wisata yaitu sesuatu yang dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat dilihat, dinikmati dan yang termasuk dalam hal ini adalah tari-tarian, nyanyian kesenian rakyat tradisional, upacara adat, dan lain-lain. Dalam (Oka A. Yoeti, 1997) *tourism* disebut *attractive spontance*, yaitu segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang – orang mau datang berkunjung ke suatu tempat tujuan wisata diantaranya adalah :

- a) Benda – benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta, yang dalam istilah *Natural Amenities*. Termasuk kelompok ini adalah :

1. Iklim contohnya curah hujan, sinar matahari, panas, hujan dan salju.
2. Bentuk tanah dan pemandangan contohnya pegunungan, perbukitan, pantai, air terjun dan gunung api.

3. Hutan belukar.
4. Flora dan fauna, yang tersedia di cagar alam dan daerah perburuan.
5. Pusat – pusat kesehatan, misalnya : sumber air mineral, sumber air anas dan mandi lumpur. Dimana tempat tersebut diharapkan dapat menyembuhkan macam – macam penyakit.

b) Hasil ciptaan manusia (*man made supply*). Kelompok ini dapat dibagi dalam empat produk wisata yang berkaitan dengan tiga unsur penting yaitu *historical* (sejarah), *cultural* (budaya) dan *religious* (agama)

1. Monumen bersejarah dan sisa peradaban masa lampau (*artifact*)
2. Museum, *art gallery*, perpustakaan, kesenian rakyat dan kerajinan tangan
3. Acara tradisional, pameran, festival, upacara naik haji, pernikahan, khitanan, dan lain – lain.
4. Rumah – rumah ibadah, seperti masjid, candi, gereja dan kuil

2. Aksesibilitas (*accessibility*)

Aktivitas kepariwisataan banyak tergantung pada transportasi dan komunikasi karena faktor jarak dan waktu yang sangat mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Unsur yang terpenting dalam aksesibilitas adalah transportasi, maksudnya yaitu frekuensi penggunaannya, kecepatan yang dimilikinya dapat mengakibatkan jarak seolah – olah menjadi dekat.

Selain transportasi yang berkaitan dengan aksesibilitas adalah prasarana meliputi jalan, jembatan, terminal, stasiun dan bandara. Prasarana

ini berfungsi untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lain. Keberadaan prasarana transportasi akan mempengaruhi laju tingkat transportasi itu sendiri. Kondisi prasarana yang baik akan membuat laju transportasi optimal

3. Fasilitas (*amenities*)

Fasilitas pariwisata tidak akan terpisah dengan akomodasi perhotelan karena pariwisata tidak akan pernah berkembang tanpa penginapan. Fasilitas wisata merupakan hal – hal penunjang terciptanya kenyamanan wisatawan untuk dapat mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Adapun sarana – sarana penting yang berkaitan dengan perkembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

- a) Akomodasi hotel
- b) Restoran
- c) Air bersih
- d) Komunikasi
- e) Hiburan
- f) Keamanan

Pembangunan suatu objek wisata harus dirancang dengan bersumber pada potensi daya tarik yang dimiliki objek tersebut dengan mengacu pada cerita keberhasilan pengembangan yang meliputi berbagai kelayakan, yaitu diantaranya adalah :

- a) Kelayakan finansial

Studi kelayakan ini menyangkut perhitungan secara komersial dari pembangunan objek wisata tersebut. Perkiraan untung – rugi sudah harus diperkirakan dari awal. Berapa tenggang waktu yang dibutuhkan untuk kembali modal pun sudah harus diramalkan.

b) Kelayakan sosial ekonomi regional

Studi kelayakan ini dilakukan untuk melihat apakah investasi yang ditanamkan untuk membangun suatu objek wisata juga akan memiliki dampak sosial ekonomi secara regional; dapat menciptakan lapangan kerja atau berusaha, dapat meningkatkan penerimaan devisa, dapat meningkatkan penerimaan pada sektor yang lain seperti pajak, perindustrian, perdagangan, pertanian dan lain – lain. Dalam kaitannya dengan hal ini pertimbangan tidak semata – mata komersial saja tetapi juga memperhatikan dampaknya secara lebih luas.

c) Layak teknis

Pembangunan objek wisata harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dengan melihat daya dukung yang ada. Tidaklah perlu memaksakan diri untuk membangun suatu objek wisata apabila daya dukung objek wisata tersebut rendah. Daya tarik suatu objek wisata tersebut membahayakan keselamatan para wisatawan.

d) Layak lingkungan

Analisis dampak lingkungan dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan pembangunan suatu objek wisata. Pembangunan objek wisata yang mengakibatkan rusaknya lingkungan harus dihentikan pembangunannya.

Pembangunan objek wisata bukanlah untuk merusak lingkungan tetapi sekedar memanfaatkan sumber daya alam untuk kebaikan manusia dan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga menjadi keseimbangan, keselarasan dan keserasian hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan alam dan manusia dengan tuhan.

Dalam membangun objek wisata tersebut harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, sosial budaya daerah setempat, nilai-nilai agama, adat istiadat, lingkungan hidup, dan objek wisata itu sendiri. Pembangunan objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh pemerintah, badan usaha maupun perseorangan dengan melibatkan dan bekerjasama pihak-pihak yang terkait. Muljadi (2009) menjelaskan bahwa pengembangan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada. Adanya daya tarik wisata membuat setiap daerah harus mampu mengusahakan obyek wisata tersebut agar menjadi daerah tujuan wisata bagi para wisatawan. Pengembangan daya tarik ini merupakan proses membangun dan mengelola obyek wisata yang ada. Sehingga nantinya dengan adanya pengembangan obyek daya tarik wisata ini mampu meningkatkan pariwisata di daerah tersebut.

F. Pengertian Pembangunan Pariwisata

Menurut peraturan pemerintah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2010-2025. Dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksud dengan :

- 1) Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

- 2) Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

Jadi disimpulkan, Pembangunan Pariwisata adalah suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata. Mulai dari Sarana Prasarana, Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), dan aspek-aspek lainnya.

Tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata
- 2) Mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- 3) Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
- 4) Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

G. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sanskerta yang komponen-komponennya terdiri dari : “Pari” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling; “Wis(man)” yang berarti rumah, properti, kampung, komunitas dan “ata” berarti pergi terus-menerus, mengembara (*roaming about*) yang bila dirangkai

menjadi satu kata melahirkan istilah pariwisata, berarti : pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud untuk menetap di tempat yang menjadi tujuan perjalanan (Pendit, 2002). Sedangkan konsep pariwisata menurut (Burkart dan Medlik, 1981) bahwa wisatawan memiliki empat ciri, diantaranya adalah :

- a. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan dan tinggal diberbagai tempat tujuan.
- b. Tempat tujuan wisatawan berbeda dari tempat tinggal dan tempat kerjanya sehari-hari, karena itu kegiatan wisatawan tidak sama dengan kegiatan penduduk yang berdiam dan bekerja di tempat tujuan wisata.
- c. Wisatawan bermaksud pulang kembali dalam beberapa hari atau bulan-bulanan, karena perjalanan itu bersifat sementara dan berjangka panjang.
- d. Wisatawan melakukan perjalanan bukan untuk mencari tempat tinggal untuk menetap di tempat tujuan atau bekerja untuk mencari nafkah.

Menurut Cohen (1974) seorang wisatawan adalah seorang pelancong yang melakukan perjalanan atas kemauan sendiri dan untuk waktu sementara dengan harapan mendapat kenikmatan dari hal-hal baru dan perubahan yang dialami selama dalam perjalanan yang relatif lama dan tidak berulang. Menurut Cohen (1974), konsep pariwisata adalah sebuah konsep yang jernih, garis-garis batas antara peran wisatawan dan bukan peran wisatawan sangat kabur, dan banyak mengandung kategori antara. Ada tujuh ciri perjalanan

wisata, menurut pendapatnya yang membedakan wisatawan dari orang-orang lain yang juga bepergian adalah sebagai berikut :

- a. Sementara, untuk membedakan perjalanan tiada henti yang dilakukan petualang (*Tramp*) dan pengembara (*Nomad*).
- b. Sukarela atau atas kemauan sendiri, untuk membedakan perjalanan yang harus dilakukan orang yang diasingkan dan pengungsi.
- c. Perjalanan pulang pergi, untuk membedakan dari perjalanan satu arah yang dilakukan orang yang pindah ke negara lain (*Migran*).
- d. Relatif lama, untuk membedakan dari perjalanan pesiar (*excursion*) bepergian (*Trip*).
- e. Tidak berulang-ulang, untuk membedakan perjalanan berkali-kali yang dilakukan orang yang memiliki rumah istirahat (*Holiday house owner*)
- f. Tidak sebagai alat, untuk membedakan dari perjalanan sebagai cara untuk mencapai tujuan lain, seperti perjalanan dalam rangka usaha, perjalanan yang dilakukan pedagang dan orang yang berziarah
- g. Untuk sesuatu yang baru dan berubah, untuk membedakan dari perjalanan untuk tujuan-tujuan lain seperti misalnya menuntut ilmu
- h. Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan untuk melakukan kegiatan yang bukan untuk menghasilkan upah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olahraga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha lainnya. Menurut (Robinson dalam Pitana, 2005), pariwisata berkembang karena adanya gerakan manusia dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajahi wilayah yang baru, mencari perubahan suasana, atau untuk mendapat perjalanan baru. Jadi pariwisata adalah sebuah kegiatan perjalanan menuju suatu tempat dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan berlibur dan rekreasi.

H. Pengembangan Pariwisata

Alasan utama perkembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal, regional atau lingkup internasional sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau Negara tersebut. Dengan kata lain pengembangan pariwisata pada suatu daerah selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakatnya. Menurut Kementerian (Kebudayaan dan Pariwisata, 2002) strategi pengembangan terdiri dari:

1. Strategi Pengembangan Produk Wisata

Menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pengembangan obyek dan daya tarik wisata, pengembangan saran

akomodasi, pengembangan aksesibilitas atau angkutan wisata, usaha makan minum, dll.

2. Strategi Pengembangan Pasar dan Promosi

a. Strategi pengembangan pasar, dalam strategi ini orientasi pasar yang akan diperoleh dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menarik pasar tersebut dengan mempertimbangkan jenis dan potensi obyek, daya tarik potensial yang ada dan jenis atau bentuk pariwisata yang dikembangkan.

b. Strategi promosi, langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah dalam mempromosikan daerahnya, strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran dan target wisatawan yang akan diraih.

3. Strategi pemanfaatan ruang untuk Pariwisata

Strategi pengembangan ruang pariwisata pada lingkup kabupaten/kota memberikan gambaran dan indikasi lokasi-lokasi prioritas pengembangan, berdasarkan analisis terhadap potensi dan daya tarik wisata yang ada di wilayah tersebut, meliputi : penetapan kawasan prioritas pengembangan, penetapan jalur wisata.

4. Strategi pengembangan sumber daya manusia

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia pariwisata potensial menurut konsep nasional adalah sumber daya manusia pariwisata sebagai asset daerah yang mempunyai standar kemampuan (knowledge and skill) menurut kompetensi keahlian yang diakui dan diterima oleh

masyarakat pariwisata (user) serta dilandasi oleh dedikasi kebangsaan yang tinggi sehingga memiliki nilai kompetitif dan mampu berkiprah di skala nasional maupun internasional. Pembangunan sumber daya manusia di bidang pariwisata sangat diperlukan agar daerah yang akan mengembangkan pariwisata daerahnya dapat menyediakan sendiri kebutuhan akan tenaga-tenaga pariwisata yang terlatih, sehingga dapat menyerap tenaga-tenaga pariwisata yang terlatih, sehingga dapat menyerap tenaga lokal dan meningkatkan apresiasi dan pengertian terhadap pariwisata sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar internasional. Strategi pengembangan sumber daya manusia antara lain:

- a. Penyiapan tenaga terampil di bidang perhotelan, restoran, biro perjalanan atau travel dan pemandu wisata.
 - b. Peningkatan kemampuan berbahasa inggris di kalangan stakeholder yang bergerak di bidang pariwisata
 - c. Peningkatan dan kemampuan kesiapan masyarakat sebagai tuan rumah
 - d. Peningkatan kemampuan teknis di bidang maajemen kepariwisataan
 - e. Peningkatan kemampuan di bidang pemasaran dan promosi pariwisata daerah.
5. Strategi pengelolaan lingkungan

Strategi umum yang mendasari pengembangan kepariwisataan. Strategi ini mendukung kebijakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan merupakan langkah proaktif dalam upaya pelestarian lingkungan alam dan budaya. Meliputi:

- a. Pengembangan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan hemat energi.
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang berada di obyek dan daya tarik wisata
- c. Peningkatan dan pemantapan konservasi kawasan-kawasan yang rentan rusak.

6. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata

Dalam pengembangan pariwisata, terdapat berbagai macam tujuan yang hendak dicapai. Baik tujuan yang mampu menguntungkan bagi Negara, daerah, pihak, pengelola, masyarakat sekitar, serta bagi wisatawan. Lebih lanjut ada beberapa tujuan pengembangan di Indonesia menurut Yoeti (1996:151):

- a. Meningkatkan pendapatan *devisa* pada khususnya dan pendapatan Negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industry-industri sampingan lainnya
- b. Memperkenalkan dan mendaya-gunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.

- c. Meningkatkan persaudaraan/ persahabatan nasional dan internasional.

Tujuan dari pengembangan pariwisata bukan hanya sekedar peningkatan perolehan devisa bagi sebuah Negara, akan tetapi lebih jauh diharapkan pariwisata dapat berperan sebagai fasilitator pembangunan (*agent of development*). Dilihat dari sudut ekonomi, sedikitnya ada delapan keuntungan pengembangan pariwisata di Indonesia: *pertama*, peningkatan kesempatan berusaha. *Kedua*, kesempatan kerja. *Ketiga*, peningkatan penerimaan pajak. *Keempat*, peningkatan pendapatan nasional. *Kelima*, percepatan proses pemerataan pendapatan. *Keenam*, meningkatkan nilai tambah produk hasil kebudayaan. *Ketujuh*, memperluas pasar produk dalam negeri. Dan *kedelapan*, memberi dampak *multiplier-effect* dalam perekonomian sebagai akibat pengeluaran wisatawan, para investor, maupun perdagangan luar negeri (Yoeti, 2001:xix).

Tujuan pengembangan pariwisata menurut Soekadijo (1996) diantaranya adalah untuk mendorong perkembangan beberapa sektor ekonomi, yaitu antara lain:

- a. Meningkatkan urbanisasi karena pertumbuhan, perkembangan serta perbaikan fasilitas pariwisata.
- b. Mengubah industri-industri baru yang berkaitan dengan jasa-jasa wisata. Misalnya, usaha transportasi, akomodasi (hotel, motel,

pondok wisata, perkemahan, dan lain-lain) yang memerlukan perluasan beberapa industri kecil seperti kerajinan tangan.

- c. Memperluas pasar barang-barang lokal
- d. Memberi dampak positif pada tenaga kerja, karena pariwisata dapat memperluas lapangan kerja baru (tugas baru di hotel atau tempat penginapan, usaha perjalanan, industry kerajinan tangan dan cendera mata, serta tempat-tempat penjualan lainnya).

7. Sasaran Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata mengemban misi pencapaian sasaran oleh pemerintah, sejalan dengan hal tersebut dalam pengembangan pariwisata juga dapat memajukan pembangunan daerah. Terkait hal tersebut maka ada beberapa sasaran pengembangan pariwisata yang dikemukakan oleh (Yoeti, 1997):

- a. Berusaha memelihara kebudayaan serta tata lingkungan karena hal ini merupakan kekayaan Indonesia sebagai daya tarik wisatawan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.
- b. Perbaikan-perbaikan terutama diharapkan pada peningkatan rehabilitasi berdasarkan skala prioritas yang ditentukan, baik dari objek-objek wisata maupun sarana dan prasarana yang menunjang sektor pariwisata.
- c. Menyelenggarakan suatu pemasaran kepariwisataan yang terkoordinasi dan sistematis serta terarah secara terus-menerus.

- d. Mengadakan pembinaan, bimbingan serta pengadaan tenaga kerja yang terdidik dalam sektor pariwisata.
- e. Mengadakan pembinaan dan pengaturan kelembagaan, baik sektor wisata maupun sektor pemerintah untuk menunjang pengembangan pariwisata nasional.

I. Dasar Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata dalam negeri telah diarahkan untuk memupuk cinta tanah air dan bangsa, menanamkan jiwa dan semangat serta nilai-nilai luhur bangsa, meningkatkan kualitas budaya bangsa, memperkenalkan peninggalan sejarah, keindahan alam termasuk bahari dengan terus meningkatkan wisata remaja-remaja pemuda. Peningkatan kesadaran dan pariwisata masyarakat melalui usaha penyuluhan dan pembinaan kelompok-kelompok seni budaya, industry kerajinan, memperkenalkan dan mengembangkan budaya bangsa, terpeliharanya kepribadian bangsa dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata, kebijaksanaan yang digariskan adalah yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam, flora dan fauna hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan model bagi

perkembangan dan peningkatan kepariwisataan di Indonesia. Model ini harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan untuk berbagai tujuan nasional, termasuk untuk masyarakat dan persahabatan antarbangsa.

Penyelenggaraan kepariwisataan tersebut dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup, serta daya tarik wisata itu sendiri.

Nilai-nilai budaya bangsa yang menuju ke arah kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, kesusilaan dan ketertiban umum guna memperkokoh jati diri bangsa dan dalam rangka perwujudan wawasan nusantara, karena itu, untuk mewujudkan pembangunan pariwisata harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
2. Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
3. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup
4. Kelanjutan dari usaha pariwisata itu sendiri.

Asas perikehidupan dalam keseimbangan adalah penyelenggaraan kepariwisataan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antarmanusia dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari

masyarakat dunia. Asas kepercayaan pada diri sendiri adalah segala usaha dan kegiatan kepariwisataan harus mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan diri sendiri, serta dilakukan dalam rangka keseimbangan aspek materiil dan spiritual.

Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Indonesia dimaksudkan agar daya tarik wisata yang sedemikian banyak dimiliki bangsa Indonesia dapat dikenal, baik oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat dunia serta dapat didayagunakan secara optimal, dengan tetap menjaga keutuhan dan keasliannya, serta menghindarkan dari kerusakan. Sebaliknya, dengan adanya penyelenggaraan kepariwisataan tersebut harus senantiasa ditingkatkan.

Dengan kepariwisataan terdapat keterkaitan yang erat antara kegiatan kepariwisataan dalam aspek sosial yang menyangkut hubungan antara manusia, yaitu wisatawan dengan masyarakat lokal di daerah tujuan wisata, di samping itu, kegiatan ini tidak menutup kemungkinan akan membawa dampak terhadap lingkungan fisik di daerah tujuan tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa aktivitas perjalanan manusia dilator belakang oleh adanya keinginan dan kebutuhan yang beraneka ragam. Dalam kaitannya dengan perjalanan wisata, faktor motivasi merupakan hal yang berpengaruh terhadap terselenggaranya perjalanan tersebut. Motivasi perjalanan sebenarnya timbul akibat adanya realisasi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

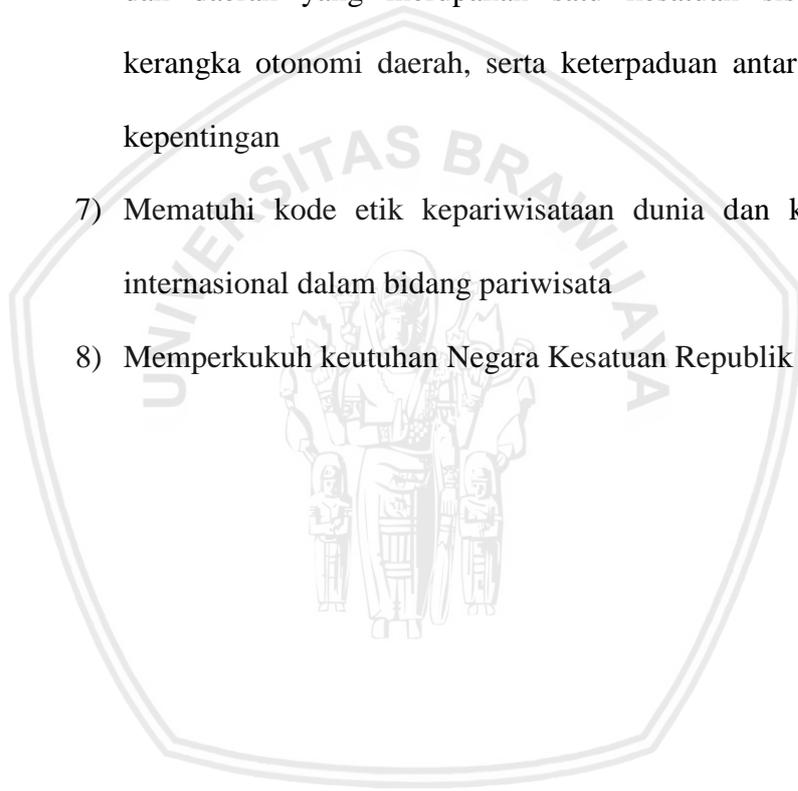
Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan Indonesia adalah:

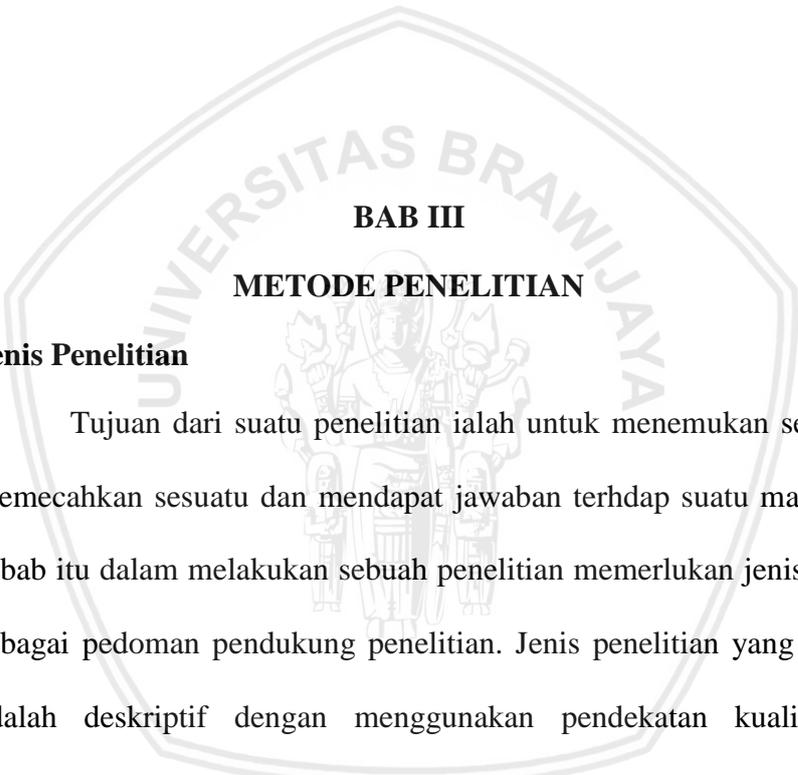
- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- 3) Menghapus kemiskinan
- 4) Mengatasi pengangguran
- 5) Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya
- 6) Memajukan kebudayaan
- 7) Mengangkat citra bangsa
- 8) Memupuk rasa cinta tanah air
- 9) Memperkukuh jatidiri dan kesatuan bangsa
- 10) Mempererat persahabatan antarbangsa

Berdasarkan undang-undang tersebut kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu:

- 1) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, serta hubungan manusia dan lingkungan
- 2) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal

- 3) Member manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proposionalitas
- 4) Memelihara kelestarian alam dalam dan lingkungan hidup
- 5) Memberdayakan masyarakat setempat
- 6) Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistem dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan
- 7) Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata
- 8) Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tujuan dari suatu penelitian ialah untuk menemukan sesuatu atau memecahkan sesuatu dan mendapat jawaban terhadap suatu masalah, oleh sebab itu dalam melakukan sebuah penelitian memerlukan jenis penelitian sebagai pedoman pendukung penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai gambaran proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri. Informan yang dipakai adalah informan yang memiliki keterkaitan dengan masalah dan fokus penelitian yang diteliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sudah ditentukan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (H.B. Sutopo, 2006:111) Penelitian deskriptif yaitu penelitian

yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan. Metode kualitatif merujuk pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, apa yang ditulis dan dikatakan oleh orang/tingkah laku yang diamati.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Berhubungan dengan hal tersebut, Moleong (2005, h.6) menjelaskan: bahwa penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan atau apa yang di alami langsung oleh subyek penelitian (60) terkait perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lainnya yang bermula dengan tujuan peneliti, dan dengan digunakannya pendekatan ini hasilnya akan sangat berdampak dan menjangkau sebagai sumber data dalam penelitian ini. Namun dalam penelitian kali ini, peneliti hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu gejala atau keadaan secara variable dan tidak bermaksud mengujinya secara hipotesis.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan masalah yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum Sugiyono (dalam Yanti 2016). Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi dilapangan. Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial.

Pembatasan fokus sangat penting artinya dalam menentukan batasan penelitian yang akan dilakukan sehingga akan memperjelas batasan dan juga mempertajam pemahaman. Oleh karena itu sehubungan dengan topik proses penyusunan rencana kerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kediri, maka agar penelitian ini nantinya lebih terarah dan mudah dalam hal pencarian data, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Proses penyusunan rencana kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kediri meliputi :

- a. Tahap Persiapan
- b. Penyusunan Rancangan Renja
- c. Pelaksanaan Forum Musrenbang
- d. Tahap Penetapan Renja
- e. Aktor- aktor yang terlibat

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat proses penyusunan rencana kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri.

- a. Faktor Pendukung
 - 1) Keterlibatan masyarakat
 - 2) Dukungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - 3) Dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri
- b. Faktor Penghambat
 - 1) Belum optimalnya koordinasi antar sektor dan masyarakat
 - 2) Pelaksanaan pendekatan partisipatif belum maksimal

3) Berbenturnya kebijakan politik dengan kehendak masyarakat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Moleong, (2005) mengartikan lokasi penelitian sebagai tempat melaksanakan aktifitas penelitian, dalam penentuan lokasi dilakukan dengan mempelajari dan mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian. Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat mengamati keadaan sebenarnya dari objek penelitian. Sehingga peneliti mendapat data yang valid, akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian yang akan dituju oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja dan prosedur penyusunan Rencana Kerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri. Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Kediri.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu :

- 1) Bapak Ir. Adi Suwignyo, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri
- 2) Ibu Puspita Dwi A. S.sos. MM selaku Kasubag. Penyusunan Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri
- 3) Bapak Toni selaku staf bidang data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri
- 4) Ibu Yuli selaku staf bidang data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri

a. Data Sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, internet, maupun data dari dokumen-dokumen yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Kediri, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri mengenai permasalahan yang diteliti antara lain :

- a. Dokumen formal maupun non formal yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri.
- b. Arsip-arsip, dokumen maupun laporan yang terkait dengan proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri.
- c. Buku refrensi, jurnal, artikel, maupun situs resmi yang berkaitan dengan bahasan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kejadian, dokumen seseorang yang dipilih untuk memperoleh data-data maupun informasi yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri
- b. Dokumen yaitu sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis, seperti undang-undang, bahan-bahan laporan, dokumen-dokumen yang ada di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri
- c. Orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi lapangan, yaitu peneliti langsung terjun pada objek yang diteliti dengan tujuan memperoleh informasi yang kompleks di lokasi penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara yaitu kegiatan Tanya-jawab antara peneliti dengan beberapa pihak yang memiliki kompetensi dan peranan yang berhubungan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.
2. Studi literatur yaitu proses memperoleh data melalui buku-buku literatur, jurnal penelitian, makalah, serta rujukan referensi dari penelitian sebelumnya.
3. Observasi, observasi yaitu metode yang terfokus pada pengamatan langsung di lokasi penelitian guna melihat dan mengetahui secara pasti mengenai Implementasi Pembangunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri melalui pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2015.
4. Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang berasal dari laporan-laporan atau dokumentasi yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri, serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pengumpulan data. Dalam mendukung proses pengumpulan data yang dikehendaki berikut adalah instrument yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti

Merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan karena hanya peneliti yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya secara langsung.

2. Pedoman wawancara

Merupakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan. Pedoman wawancara ini digunakan dalam kegiatan wawancara untuk pengumpulan data yang diperlukan sesuai topic penelitian yang sedang diteliti.

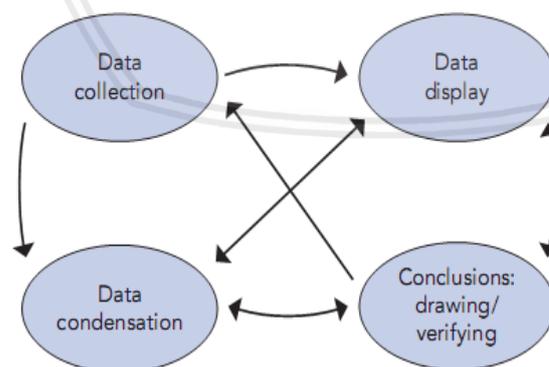
3. Perangkat penunjang

Merupakan alat yang digunakan peneliti yang berfungsi mendukung kegiatan penelitian berupa catatan lapangan dan dokumentasi. Dalam

penelitian ini penulis menggunakan alat tulis-menulis, alat dokumentasi dan pemotretan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga lebih mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2012). Analisis dalam penelitian proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri menggunakan analisis model Miles, Huberman & Saldana (2014) yang terdiri dari empat langkah yaitu :



Gambar 3. 1. Model Analisis Data Interaktif
Sumber. Miles, Huberman, dan Saldana, 2014

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam tahapan ini peneliti akan mengumpulkan data menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, observasi, serta dokumentasi mengenai data yang relevan dengan proses penyusunan rencana kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Pada tahapan ini, peneliti melakukan secara berulang-ulang agar mencapai kejenuhan data. Sehingga penelitian yang dilakukan memperoleh hasil yang optimal.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Tahapan analisis selanjutnya dalam penelitian ini adalah kondensasi data. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka data-data yang diperoleh mengenai proses penyusunan rencana kerja SKPD kemudian ditelaah. Data-data yang telah ditemukan dilakukan proses pemilihan, pemusatan, penyerderhanaan, dan ditransformasi menjadi rangkuman, tabel, maupun gambar yang disesuaikan dengan fokus penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahapan analisis data setelah kondensasi data yaitu penyajian data. Penyajian data berisikan sekumpulan informasi dalam bentuk laporan yang didapatkan dari situs penelitian. Pada tahapan ini, peneliti menyajikan data sesuai dengan fokus penelitian tentang bagaimana proses penyusunan rencana kerja SKPD yang didalamnya terdapat beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum, dan penetapan renja serta faktor pendukung dan penghambat proses penyusunan rencana kerja Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Kediri sehingga informasi dalam laporan skripsi dapat dipelajari dan dimengerti oleh berbagai pihak.

4. Kesimpulan, Penarikan atau verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis data seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi.

Data yang diperoleh sejak awal senantiasa harus dibuat kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat tentatif, kabur dan diragukan, tetapi dengan bertambahnya data dan informasi, melalui proses verifikasi secara terus menerus maka diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded”. Dalam hal ini analisis kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kabupaten Kediri

a. Sejarah

Kediri berasal dari kata “Diri” Yang artinya “Adeg” (berdiri) mendapat awalan “Ka” menjadi “Kadiri” yang berarti “Menjadi Raja” juga dapat berarti mandiri atau berdiri tegak, berkepribadian atau berswasembada. Kabupaten Kediri dibentuk tanggal 25 Maret 804 Masehi lewat tangan Bagawanta Bhari. Kediri sejak dulu merupakan salah satu daerah yang memegang peranan penting dalam membentuk serta mewarnai sejarah Nusantara. Sedangkan agama mayoritas adalah Islam dengan sebagian Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha.

b. Keadaan Geografis

Kabupaten Kediri merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis di Provinsi Jawa Timur karena terletak di jalur utama lalu lintas yang menghubungkan antara bagian barat dan timur Pulau Jawa. Luas wilayah Kabupaten Kediri adalah 1.366,05 Km² atau 138.605 Ha. Secara administratif Kabupaten Kediri terbagi menjadi 26 kecamatan dengan 343 desa dan 1 kelurahan.

Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Kediri sebagai berikut :

71

Sebelah Utara : Kabupaten Jombang dan Kabupaten

Nganjuk

Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Kabupaten

Tulungagung

Sebelah Timur : Kabupaten Malang dan Kabupaten

Jombang

Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten

Tulungagung

Secara geografis, Kabupaten Kediri terletak pada posisi $111^{\circ} 47' 05''$ s/d $112^{\circ} 18' 20''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 36' 12''$ s/d $8^{\circ} 0' 32''$ Lintang Selatan. Berdasarkan topografinya Kabupaten Kediri dibagi menjadi 4 (empat) golongan dari luas wilayah, yaitu ketinggian di atas 0 meter – 100 meter dpl membentang seluas 32,45%, ketinggian di atas 100 meter – 500 meter dpl membentang seluas 53,83%, ketinggian di atas 500 meter – 1.000 meter dpl membentang seluas 9,98% dan ketinggian di atas 1.000 meter dpl membentang seluas 3,73%

Secara geologis, karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- 1) Bagian Barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur
- 2) Bagian Tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintas aliran Sungai Brantas dari selatan ke utara yang membelah wilayah Kabupaten Kediri
- 3) Bagian Timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membentang dari Gunung Argowayang di Bagian utara dan Gunung Kelud di wilayah selatan

Pola penggunaan lahan didominasi untuk lahan pertanian tanaman pangan (sawah) seluas 47.701 Ha atau sekitar 34,42% dari total luas wilayah. Kemudian untuk guna lahan lading/tegal sebesar 26.598 Ha ($\pm 19,19\%$), untuk guna lahan pekarangan memiliki luas sebesar 3.982 Ha ($\pm 2,87\%$), guna lahan hutan rakyat sebesar 924 Ha ($\pm 0,67\%$), guna lahan perkebunan sebesar 8.533 Ha ($\pm 6,16\%$), serta guna tanah kering lainnya dengan seluas 50.867 Ha ($\pm 36,70\%$).

Topografi wilayah Kabupaten Kediri yang cukup beragam dengan rata-rata ketinggian tanah diantara 0-500 meter dari permukaan laut (dpl). Wilayah bagian utara-selatan Kabupaten Kediri merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-200 meter dpl, sementara pada wilayah bagian barat-timur merupakan wilayah perbukitan dan bergelombang. Berdasarkan topografinya, wilayah Kabupaten Kediri terdiri

dari selatan ke utara. Suhu udara berkisar antara 23° C sampai dengan 31° C dengan tingkat curah hujan rata-rata sekitar 1652 mm per hari.

2. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Kediri

a. Visi dan Misi

Adapun visi dari pemerintah Kabupaten Kediri yang dapat disajikan sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, Mandiri, Tentram dan Sejahtera yang berbasis Lima Sektor Utama Pembangunan, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Industri-Perdagangan dan Pariwisata, yang Didukung oleh Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional”

Untuk mewujudkan Visi Tersebut, ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2011-2015 sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai wujud peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta terwujudnya keluarga sehat.
- 3) Menumbuh-kembangkan aktivitas pendidikan formal, non-formal dan informal untuk meningkatkan sumber daya generasi muda sebagai upaya mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 4) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pola hidup sehat sebagai langkah nyata menuju keluarga sejahtera.

- 5) Membangun kehidupan masyarakat yang tertata, taat hokum dan peraturan perundangan, saling menghargai satu sama lain sebagai dasar pemahaman atas hak asasi manusia, gotong-royong, dan toleran, dalam rangka menciptakan suasana aman, tertib dan damai di masyarakat.
- 6) Mengembangkan industri dan perdagangan berbasis pertanian yang berorientasi pada mekanisme pasar bersama koperasi dan UKM.
- 7) Mewujudkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
- 8) Menciptkan suasana kondusif sehingga membuat kehidupan masyarakat menjadi tentram.
- 9) Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN, transparan, akuntabel, responsif terhadap permasalahan masyarakat sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
- 10) Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan
- 11) Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi

- 12) Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.
- 13) Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi
- 14) Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang
- 15) Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat

3. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri

a. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri

Sejalan dengan sasaran kerja Pemerintah Kabupaten Kediri, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri memiliki Visi Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataaan di Kabupaten Kediri yang sinergis dan terintegritas dengan visi pembagunan daerah Kabupaten Kediri.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, ditetapkan misi yang merupakan penjabaran langkah-langkaah yang akan dilaksanakan dalam pencapaian visi. Mengemban amanat pada misi ke tujuh (7) yakni melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebuayan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah, maka misi tersebut dijabarkan dalam misi satker, yaitu:

- 1) Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya Kediri dalam rangka memperkuat karakter bangsa pada masyarakat Kabupaten Kediri;
- 2) Meningkatkan pengembangan nilai budaya dan pengelolaan keragaman serta kekayaan budaya;
- 3) Menumbuhkembangkan industri pariwisata yang berdayasaing, destinasi pariwisata yang berkelanjutan serta memperluas jaringan pemasaran pariwisata serta peningkatan kerjasama antar pelaku pariwisata;
- 4) Mengembangkan sumber daya dan potensi kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Kediri;
- 5) Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- 6) Pemberdayaan perekonomian masyarakat dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata.
- 7) Melaksanakan ajaran agama dan / atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni
- 8) Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah
- 9) Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang

b. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berpedoman pada sejumlah peraturan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 7. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 8. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahpan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
 10. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061 /2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri
17. Peraturan Bupati Kediri Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2017

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun uraian tugas dan fungsi dari setiap pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata;
 - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengordinasi bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan saran prasana. Dalam melaksanakan tugas sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a) Penyusunan rancangan kebijakan Dinas
 - b) Penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas;
 - c) Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi kepegawaian, keuangan dan sarana prasarana
 - d) Pengordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang
 - e) Penyusunan profil dinas
 - f) Pengordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang kebudayaan dan pariwisata;

- g) Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan perpustakaan;
- h) Pelaksanaan analisa jabatan dan beban kerja
- i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis dinas
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Program dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- 3) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas serta melaksanakan administrasi keuangan. Dalam melakukan tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan dan pelaporan Dinas;
 - b) Penyusunan perencanaan program
 - c) Penyiapan bahan penyusunan profil dinas
 - d) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang
 - e) Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang kebudayaan dan pariwisata

- f) Penyiapan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 - g) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dinas
 - h) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belanja tidak langsung dan belanja langsung
 - i) Penyiapan bahan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan lainnya
 - j) Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan dan capaian kinerja keuangan
 - k) Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan
 - l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, dan sarana – prasarana administrasi kepegawaian. Dalam melakukan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, dan sarana prasarana;

- b) Pengelolaan administrasi perkantoran rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, dan sarana prasarana;
 - c) Penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian barang di Lingkungan Dinas;
 - d) Pengelolaan pengamanan dan perawatan barang/peralatan inventaris serta gedung;
 - e) Pengelolaan pengawasan dan pengendalian inventaris barang/peralatan serta pemeriksaan barang secara berkala;
 - f) Penyiapan bahan pelaksanaan keprotokolan , dan pengurusan administrasi perjalanan Dinas
 - g) Penyiapan bahan pelaporan, inventarisasi barang dan gedung
 - h) Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, promosi , pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan pegawai
 - i) Penyiapan bahan penilaian angka kredit pejabat fungsional
 - j) Penyiapan bahan pembinaan administrasi pegawai
 - k) Penyiapan bahan analisa jabatan dan beban kerja
 - l) Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan kepegawaian
 - m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 5) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan, pemantauan

usaha dan pemasaran pariwisata serta pelayanan informasi wisata. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan kepariwisataan
- b) Pengoordinasian, fasilitas dan pembinaan pemasaran pariwisata;
- c) Pelaksanaan penetapan kebijakan kerjasama bidang pariwisata;
- d) Pelaksanaan penetapan pedoman dan penyelenggaraan serta pengiriman atau menerima widyawisata;
- e) Pelaksanaan promosi, publikasi dan pelayanan informasi serta road show pariwisata;
- f) Pengembangan serta sistem informasi pemasaran pariwisata
- g) Pemberian rekomendasi perijinan usaha jasa kepariwisataan
- h) Pelaksanaan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata kabupaten
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemasaran pariwisata
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dibantu oleh Kepala Seksi Promosi Pariwisata dan Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Pariwisata.

- 6) Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas melakukan pemasaran promosi kepariwisataan. Dalam melakukan tugas Kepala Sub Seksi Promosi menyelenggarakan fungsi:
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan kepariwisataan
 - b) Penyiapan bahan pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pemasaran pariwisata
 - c) Penyiapan bahan pelaksanaan penetapan kebijakan kerjasama bidang pariwisata
 - d) Penyiapan bahan pelaksanaan penetapan pedoman dan penyelenggaraan widyawisata serta pengiriman atau menerima widyawisata
 - e) Pelaksanaan promosi, publikasi dan pelayanan informasi serta road show pariwisata
 - f) Penyiapan bahan pelaksanaan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline kabupaten
 - g) Penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pemasaran promosi pariwisata
 - h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pemasaran pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 7) Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Pariwisata, mempunyai tugas melakukan pengembangan informasi pariwisata. Dalam

melakukan tugas Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan pengoordinasian, fasilitasi dan pengembangan informasi kepariwisataan
 - b) Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan dan informasi kepariwisataan
 - c) Pengembangan pariwisata dan sistem informasi pemasaran pariwisata
 - d) Pemberian penghargaan/anugerah di bidang pariwisata
 - e) Pemberian rekomendasi perijinan usaha jasa kepariwisataan
 - f) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan informasi kepariwisataan
 - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 8) Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata. mempunyai tugas melaksanakan tugas pembinaan, pengelolaan dan pengembangan usaha obyek dan penyelenggaraan daya tarik wisata serta usaha dan sarana pariwisata. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
- a) Perumusana kebijakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP)

- b) Pelaksanaan rencana pengembangan, pembinaan perusahaan obyek dan daya tarik wisata
 - c) Penyelenggaraan pembinaan usaha kepariwisataan
 - d) Penyelenggaraan event pariwisata
 - e) Penyiapan rekomendasi perijinan di bidang usaha sarana kepariwisataan
 - f) Penyelenggaraan kerjasama di bidang pengembangan produk wisata dan destinasi pariwisata
 - g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pariwisata
 - h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 9) Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata, mempunyai tugas melakukan pengelolaan obyek dan penyelenggaraan daya tarik wisata. Dalam melakukan tugas Kepala Seksi Obyek dan daya Tarik Wisata menyelenggarakan fungsi :
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan Rencana Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP)
 - b) Penyiapan bahan pelaksanaan rencana pengembangan, pembinaan perusahaan obyek dan daya tarik wisata
 - c) Penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan usaha kepariwisataan
 - d) Penyiapan bahan penyelenggaraan event pariwisata

- e) Penyiapan bahan rekomendasi perijinan di bidang usaha sarana kepariwisataan
 - f) Penyiapan bahan pengadaan kerjasama di bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata
 - g) Penyiapan bahan penyelenggaraan kerjasama di bidang pengembangan produk wisata dan destinasi pariwisata
 - h) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan obyek dan daya tarik wisata
 - i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 10) Kepala Seksi Usaha Kepariwisataaan, mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan usaha kepariwisataan. Dalam melakukan tugas Kepala Seksi Usaha Kepariwisataaan menyelenggarakan fungsi :
- a) Penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan usaha kepariwisataan
 - b) Penyiapan bahan rekomendasi perijinan di bidang usaha sarana kepariwisataan
 - c) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, inventaris dan evaluasi usaha jasa dan saran pariwisata
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan

11) Kepala Bidang Kesenian, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, penyelenggaraan kegiatan kesenian, kerjasama kesenian, pengembangan bahasa sastra serta penambahan rekomendasi izin dan pengawasan kegiatan kesenian serta kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kesenian menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan pengembangan kebudayaan daerah
- b) Pelaksanaan pendataan analisis dan perencanaan serta pembinaan kesenian
- c) Penyiapan, penyusunan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk tentang tata cara penyelenggaraan kesenian
- d) Penyelenggaraan perijinan terhadap lembaga, badan, dan seniman yang bergerak di bidang kesenian dan kebudayaan
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan
- f) Penyelenggaraan kerjasama di bidang kesenian dan kebudayaan
- g) Pelaksanaan pengembangan bahasa dan sastra
- h) Pelaksanaan perlindungan Hak Karya Intelektual (HKI) bidang kesenian dan kebudayaan
- i) Pelaksanaan pemberian penghargaan/anugerah bagi instansi/ lembaga yang berjasa di bidang kesenian dan kebudayaan

- j) Pemberian izin usaha pembuatan film oleh tim asing skala Kabupaten dan perizinan usaha perfilman oleh WNI, dibidang pembuatan, pengedaran, penjualan, penyewaan, pertunjukkan, penayangan film media elektronik maupun tempat hiburan
- k) Pelaksanaan perlindungan, pengembangan, peestarian dan pemanfaatan seni bagi industri budaya
- l) Pelaksanaan pembinaan kebudayaan, festival seni serta pengembangan pertunjukan seni daerah, maupun diklat kesenian
- m) Pengiriman misi kesenian, penerimaan delegasi asing
- n) Penerapan dan monitoring standart pelayanan minimal bidang kesenian
- o) Pelaksanaan inventarisasi kesenian dan kebudayaan daerah
- p) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan

Kepala Bidang Kesenian dibantu oleh Kepala Seksi Pengembangan Kesenian dan Kepala Seksi Usaha Hiburan dan Kelembagaan.

- 12) Kepala Seksi Pengembangan Kesenian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, pendataan pelaksanaan dan izin/rekomendasi, monitoring, pengendalian kegiatan kesenian serta pengembangan bahan sastra. Dalam melakukan tugas Kepala Seksi Pengembangan Kesenian menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan kesenian daerah
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan pendataan, analisis dan perencanaan serta pembinaan kesenian
- c) Penyiapan penyusunan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk tentang tata cara penyelenggaraan kegiatan kesenian
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan
- e) Penyiapan bahan penyelenggaraan kerjasama dibidang kesenian dan kebudayaan
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan bahasa dan sastra
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kesenian dan kebudayaan
- h) Penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan seni bagi industry budaya
- i) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kebudayaan, festival seni serta pengembangan pertunjukan seni daerah maupun diklat kesenian
- j) Penyiapan bahan pengiriman misi kesenian, penerimaan delegasi asing
- k) Penyiapan bahan penerapan dan monitoring standart pelayanan minimal bidang kesenian
- l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesenian sesuai peraturan perundang-undangan

13) Kepala Seksi Usaha Hiburan dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan rekomendasi perizinan dan pengawasan penyiapan pendataan kesenian daerah. Dalam melakukakn tugas Kepala Seksi Usaha Hiburan dan kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan pendataan, analisis dan perencanaan serta pembinaan kesenian
- b) Penyiapan, penyusunan, dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk tentang tata cara pembentukan lembaga kesenian
- c) Penyiapan bahan penyelenggaraan perizinan dan rekomendasi terhadap lembaga, badan dan seniman yang bergerak di bidang kesenian dan kebudayaan
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan Hak Karya Intelektual (HKI) di bidang kesenian dan kebudayaan
- e) Penyiapan bahan pemberian izin usaha pembuatan film oleh tim Asing skala Kabupaten dan perizinan usaha perfilman oleh WNI, dibidang pembuatan, pengedaran, penjualan, penyewaan, pertunjukan, penayangan, film melalui media eletronik maupun tempat hiburan
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi kesenian dan kebudayaan daerah
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan usaha hiburan kesenian dan kebudayaan daerah

- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesenian sesuai peraturan perundang-undangan

14) Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala, mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan, pemeliharaan dan kelestarian sejarah nilai tradisional, museum dan kepurbakalaa. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan Sejarah dan Kepurbakalaan
- b) Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang pemahaman sejarah nasional, wilayah, lokal dan kebudayaan daerah
- c) Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah, kepahlawanan, peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan
- d) Pelaksanaan database dan sistem geografis sejarah
- e) Pelaksanaan inventaris, pemetaan sejarah dan dokumentasi sumber dan publikasi sejarah
- f) Pelaksanaan pendataan kegiatan dan kebendaan sejarah nilai tradisi, museum dan kepurbakalaan
- g) Penetapan Benda Cagar Budaya (BCB)/ situs
- h) Perlindungan Situs dan Benda Cagar Budaya
- i) Penelitian arkeologi, penyelenggaraan, dan pengelolaan museum

- j) Pelaksanaan, penyelamatan, pengamatan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian, dan penelitian Benda Cagar Budaya dan Situs
- k) Pelaksanaan data pendukung zoning pemiintakatan
- l) Pelaksanaan pemasyarakatan peraturan keurbakalaan dan permuseuman
- m) Pelaksanaan pembinaan organisasi Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- n) Penyiapan rencana dan program pembinaan pemeliharaan dan pelestarian nilai tradisi dan keurbakalaan
- o) Pelaksanaan pengembangan kegiatan pemeliharaan dan pelestarian jarahnitra dan muskala
- p) Pemeliharaan dan peningkatan kerjasama dengan badan/lembaga yang bergerak di bidang pembinaan, pemeliharaan dan pelestarian jarahnitra dan muskala
- q) Penyiapan pengarahan dan petunjuk fungsional kepada tenaga fungsional di bidang jarahnitra dan muskala
- r) Pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah
- s) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan, pemeliharaan dan pelestarian jarahnitra dan muskala
- t) Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan dibantu oleh Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi dan Kepala Seksi Museum dan Purbakala

15) Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi mempunyai tugas melakukan menyiapkan pembinaan pelestarian nilai sejarah, tradisi, budaya spiritual, serta pembinaan dan pengawasan organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam melakukan tugas Kepala Seksi Sejarah dan Nilai tradisi menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan Sejarah dan Kepurbakalaan
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang pemahaman sejarah nasional, wilayah, lokal dan kebudayaan daerah
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah, kepahlawanan, peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan inventaris pemetaan sejarah dan dokumentasi sumber dan publikasi sejarah
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan inventaris, pemetaan sejarah dan dokumentasi sumber dan publikasi sejarah
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan pendataan kegiatan dan benda-benda sejarah nilai tradisi, museum, dan kepurbakalaan
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

- h) Penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan kegiatan pemeliharaan dan pelestarian Sejarah Nilai Tradisi (jarahnitra)
 - i) Penyiapan bahan pemeliharaan dan peningkatan kerjasama dengan badan/lembaga yang bergerak di bidang pembinaan, pemeliharaan dan pelestarian jarahnitra
 - j) Penyiapan pengarahan dan petunjuk fungsional kepada tenaga fungsional bidang jarahnitra
 - k) Penyiapan bahan pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah
 - l) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan, pemeliharaan dan pelestarian jarahnitra
 - m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 16) Kepala Seksi Museum dan Purbakala, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendataan, penyelamatan dan penelitian benda cagar budaya/ situs serta permuseuman. Dalam melakukan tugas, Kepala Seksi Museum dan Purbakala menyelenggarakan fungsi :
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan Kepurbakalaan
 - b) Penyiapan bahan pelaksanaan pendataan kegiatan dan kebendaan sejarah nilai tradisi, museum dan kepurbakalaan
 - c) Penetapan Benda Cagar Budaya (BCB)/ situs
 - d) Perlindungan Situs dan Benda Cagar Budaya

- e) Penyiapan bahan penelitian arkeologi, penyelenggaraan dan pengelolaan museum
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian Benda Cagar Budaya dan Situs
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan data pendukung zoning permintakatan (perencanaan penggunaan tanah oleh pemerintah lokal)
- h) Penyiapan bahan pelaksanaan pemasyarakatan peraturan keurbakalaan dan permuseuman
- i) Penyiapan rencana dan program pembinaan pemeliharaan dan pelestarian keurbakalaan
- j) Penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan kegiatan pemeliharaan dan pelestarian Museum dan Kepurbakalaan (muskala)
- k) Pemeliharaan dan peningkatan kerjasama dengan badan/lembaga yang bergerak di bidang pembinaan, pemeliharaan dan pelestarian muskala
- l) Penyiapan pengarahan dan petunjuk fungsional kepada tenaga fungsional bidang muskala
- m) Penyiapan bahan pemberian imbalan jasa yang berjasa terhadap keurbakalaan

- n) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan, pemeliharaan dan pelestarian muskala
- o) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kinerja Pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri berdasarkan sasaran/target pada Indikator Kinerjanya seperti tampak pada tabel (Pencapaian Kinerja Pelayanan). Ada 3 tujuan utama yang ingin dicapai:

- a) Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan
- b) Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
- c) Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri :

- 1) Tahapan dalam Proses Penyusunan Renja SKPD

Proses penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri dilakukan dengan beberapa tahap seperti yang diutarakan oleh ibu Wiwik Puspita Sari selaku kepala penyusunan dokumen pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri yang berisikan:

“Proses dalam penyusunan RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini cukup panjang mas. Kami harus melalui beberapa tahapan, tahapan itu antara lain tahapan persiapan penyusunan renja, penyusunan rancangan renja, pelaksanaan forum SKPD, lalu baru bisa ditetapkan”

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri melakukan empat tahapan dalam proses penyusunan Rencana Kerja SKPD yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan Penyusunan

Tahapan persiapan penyusunan Renja merupakan tahapan dimana SKPD yang membuat renja mempersiapkan bahan yang didapatkan dari RKPD dan membentuk tim yang terbagi dari seluruh bagian dalam SKPD terkait. Dalam tahapan persiapan proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memuat beberapa data dan informasi pernyataan ini didukung dengan pernyataan oleh Ibu Wiwik Puspita Sari:

“Dalam tahapan persiapan ini kami menelaah rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan renja yang dimana telaah ini dilakukan oleh setiap bidang yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam tahapan ini kami membuat orientasi dimana terdapat fokus-fokus yang rencana kerja SKPD, dimana orientasi tersebut berupa rencana kerja SKPD seperti program pengembangan budaya, program pengelolaan kekayaan budaya, program pengelolaan keragaman budaya dan sebagainya dimana

program tersebut merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Setelah itu kami menyusun agenda untuk kerja tim penysusun Renja SKPD dan menyesuaikan dengan jadwal. Setelah itu kami mempersiapkan data-data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (wawancara dilakukan hari Kamis 09 Februari 2017 13.00 WIB di Kantor DISBUDPAR)”.

Dalam wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahapan persiapan proses penyusunan renja SKPD oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri dilakukan oleh setiap bidang pada dinas tersebut. Dalam tahapan tersebut bidang sosial, budaya dan pariwisata juga melakukan kegiatan pengelolaan data dan informasi yang mengacu pada RKPD. Pengolahan data yang telah dianalisis akan menjadi isu permasalahan. Berkaitan dengan data bidang sosial, budaya dan pariwisata yang akan dipersiapkan, ibu Wiwik Puspita Sari mengatakan:

“Data yang kami kumpulkan ini berupa kondisi pelayanan bidang sosial, budaya dan pariwisata dari hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2016 dan RKPD yang memperhatikan unsur-unsur pokok yaitu: masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya, tujuan yang dikehendaki, sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya, serta kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa data yang dikumpulkan merupakan hasil dari evaluasi renja tahun 2016 dengan capaian kinerja dari laporan kinerja SKPD dan RKPD yang mengandung unsur pokok yang terdapat pada bidang sosial, budaya dan pariwisata. Dalam penyiapan data dan informasi dalam penyusunan renja, sesuai yang disampaikan ibu Wiwik Puspita Sari dalam wawancara yang dilakukan pada Kamis 09 Februari 2017 pukul 13.00 :

“Dalam penyajian data ini kami menyediakan data-tanda terkait kondisi pelayanan bidang sosial, budaya dan pariwisata, organisasi dan tata laksana bidang sosial, budaya dan pariwisata, hasil evaluasi Renja bidang sosial, budaya dan pariwisata tahun sebelumnya, hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra bidang sosial, budaya dan pariwisata, kondisi dan rencana tata ruang wilayah, peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan bidang sosial, budaya dan pariwisata, pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan SKPD, data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan, rancangan awal RKPD tahun rencana, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat, informasi program dan kegiatan yang diusulkan dari kabupaten/kota untuk penyusunan Renja SKPD dari kecamatan untuk penyusunan Renja SKPD kabupaten/kota dan informasi lain terkait pelayanan SKPD”.

Dari informasi yang diperoleh dapat disimpulkan, bahwa penyusunan Renja SKPD ditahun 2015 merupakan penyusunan yang mangacu dan merujuk pada data-data yang dikumpulkan dari hasil evaluasi Renja SKPD tahun 2016. Berikut adalah tabel yang menjadi acuan untuk penyusunan Renja SKPD 2017:

Tabel. 4.1 Tabel Evaluasi LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri 2016

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2016	REALISASI 2017
I	URUSAN WAJIB : KEBUDAYAAN		
1	Jumlah Grup Kesenian	1111 grup	1148 grup
2	% kelompok seni dan budaya yang dibantu	1,98%	42,50%
3	% jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan	22,22%	68,00%
4	Jumlah gedung kesenian	3 unit	3 unit
5	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	16 kali	56 kali
6	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	96 bln	161 bln
II	URUSAN PILIHAN : PARIWISATA		

1	Jumlah kunjungan wisata	475.024 orang	1.723.892 orang
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1.7 M	3,15 M
3	Jumlah pameran dan promosi pariwisata	10 kali	18 kali
4	Jumlah klmpok sadar wisata yg dibentuk	8 kelompok	8 kelompok
5	Jmlh rekomendasi usaha pariwisata	60 usaha	80 usaha
6	Ketersediaan restoran	60 unit	61 unit
7	Ketersediaan penginapan/hotel	17 unit	17 unit

Sumber : Arsip LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri

Dengan adanya data-data yang disajikan diatas maka kegiatan selanjutnya yaitu mengevaluasi data yang akan mendaptkan output berupa isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Sesuai dengan wawancara yamh dilakukan pada kamis 09 februari 2017 pukul 13.00 diperkuat oleh Ibu Wiwik Puspita Sari yang mengatakan:

“data yang kami sajikan dan kami olah dari laporan kinerja instansi pemerintah kami jadikan sebagai isu penting tugas dan fungsi dinas. Kemudian kami sinkronkan dengan evaluasi rancangan awal RKPD untuk merumuskan tujuan dan sasaran dinas”

Berikut tabel 4.2 rancangan awal RKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri 2016 :



NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Pelayanan Adm. Perkantoran				667.791.250	Pelayanan Adm. Perkantoran				1.299.805.250	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kediri	Terlaksananya pengiriman surat menyurat selama 1 tahun.	1 Tahun	3.111.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kediri	Terlaksananya pengiriman surat menyurat selama 1 tahun.	1 Tahun		-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kediri	Tercukupinya keb. Energi listrik, air, akses telekomunikasi, sewa tanah serta pajak2 reklame	1 Tahun	83.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kediri	Tercukupinya keb. Energi listrik, air, akses telekomunikasi, sewa tanah serta pajak2 reklame	1 Tahun	83.800.000	-
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Kediri	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas	18 Unit	60.690.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Kediri	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas	18 Unit	62.090.000	12 bh Roda 2 1 bh Roda 3 4 bh Roda 4
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Kediri	Terpenuhinya Hr. tenaga adm. keu. & terpenuhi-nya kebutuhan pelaksanaan tugas2 adm. keu.	9 Orang	87.510.500	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Kediri	Terpenuhinya Hr. tenaga adm. keu. & terpenuhi-nya kebutuhan pelaksanaan tugas2 adm. keu.	9 Orang	87.510.500	Petugas Pengelola Adm. Keuangan
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Kediri	Tersedianya Hr Jasa petugas kebersihan & terpenuhinya alat2 kebersihan/bahan pembersih	2 Orang	32.280.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Kediri	Tersedianya Hr Jasa petugas kebersihan & terpenuhinya alat2 kebersihan/bahan pembersih	2 Orang	27.280.000	Petugas Kebersihan
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Kediri	Tersedianya sejumlah alat-alat tulis kantor	1 Tahun	20.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Kediri	Tersedianya sejumlah alat-alat tulis kantor	1 Tahun	20.000.000	-

7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kediri	Tercukupinya kebutuhan barang2 cetakan & penggandaan	6 Jenis	67.472.750	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kediri	Tercukupinya kebutuhan barang2 cetakan & penggandaan	6 Jenis	66.000.000	-
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kediri	Tersedianya kebutuhan alat2 instalasi listrik dan penerangan bang. kantor	1 Tahun	1.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kediri	Tersedianya kebutuhan alat2 instalasi listrik dan penerangan bang. kantor	1 Tahun	1.000.000	-
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kediri	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kediri	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	30.932.250	Belanja Modal
10						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kediri	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	1 Tahun	2.860.500	-
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kediri	Tercukupinya keb. bahan bacaan dan referensi keilmuan dinas	3 jenis	3.060.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kediri	Tercukupinya keb. bahan bacaan dan referensi keilmuan dinas	3 jenis	3.360.000	-
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Kediri	Tercukupinya kebutuhan makan dan minum rapat	1 Tahun	18.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Kediri	Tercukupinya kebutuhan makan dan minum rapat	1 Tahun	18.000.000	-
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Kediri	Tercukupinya keb. operasional perjalanan dinas luar daerah	1 Tahun	65.700.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Kediri	Tercukupinya keb. operasional perjalanan dinas luar daerah	1 Tahun	66.000.000	-
14	Penyediaan Jasa Pendukung Adm. Perkantoran / Teknis Perkantoran	Kab. Kediri	Tersedianya Hr. petugas / tenaga administrasi kantor / arsiparis	11 Orang	147.797.000	Penyediaan Jasa Pendukung Adm. Perkantoran / Teknis Perkantoran	Kab. Kediri	Tersedianya Hr. petugas / tenaga administrasi kantor / arsiparis	9 Orang	113.700.000	Petugas arsip dan pendukung adr
15	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Kab. Kediri	Tercukupinya kebutuhan operasional perj. dinas dalam daerah	1 Tahun	19.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Kab. Kediri	Tercukupinya kebutuhan operasional perj. dinas dalam daerah	1 Tahun	20.000.000	-
16						Peny. Jasa Operasional	Kab. Kediri	Tersedianya Hr. Petugas obyek wisata Kab. Kdri	1 Tahun	660.800.000	Petugas obyek se k

17	Penyediaan Jasa Administrasi Barang	Kab. Kediri	Tersedianya Hr. dan petugas / tenaga adm. barang kantor	2 Orang	8.370.000	Penyediaan Jasa Administrasi Barang	Kab. Kediri	Tersedianya Hr. dan petugas / tenaga adm. barang kantor	2 Orang	8.472.000	Petugas Pengelola Barang
18						Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Kab. Kediri	Tersedianya Hr petugas keamanan kantor	2 Orang	28.000.000	Petugas keamanan

II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				60.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				45.600.000	
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kab. Kediri	Terpenuhinya keb. ops. Pem. gedung kantor	1 Tahun	38.000.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kab. Kediri	Terpenuhinya keb. ops. Pem. gedung kantor	1 Tahun	20.000.000	
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kediri	Terpenuhinya keb. ops. pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor	1 Tahun	22.000.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kediri	Terpenuhinya keb. ops. pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor	1 Tahun	25.600.000	
III	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				53.280.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				93.866.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Kediri	Tersedianya biaya kur sus dan pelatihan peg	1 Tahun	7.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Kediri	Tersedianya biaya kur sus dan pelatihan peg	1 Tahun	7.000.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Tupoksi	Kab. Kediri	Tersedianya biaya pendikan dan pelatihan tupoksi bagi pegawai	1 Tahun	45.780.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Kediri	Tersedianya biaya pendikan dan pelatihan tupoksi bagi pegawai	1 Tahun	86.866.000	
IV	Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keu.				5.979.000	Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keu.				5.979.000	
1	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kediri	Terpenuhinya keb. operasional penyusunan lap. kinerja dinas	1 Tahun	5.979.000	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kediri	Terpenuhinya kebutuhan operasional penyusunan lap. kinerja dinas	1 Tahun	3.750.000	

2						Peny. Rencana Strategis (RENSTRA)	Kab. Kediri	Terpenuhinya kebutuhan operasional penyusunan RENSTRA	1 kegiatan	2.229.000
V	Pengembangan Nilai Budaya				208.970.000	Pengembangan Nilai Budaya				257.570.000
1	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Kab. Kediri	Terlaksananya pembinaan terhadap pelaku upacara adat daerah, para penghayat & para pendidik sejarah budaya	1 Tahun	178.770.000	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Kab. Kediri	Terlaksananya pembinaan terhadap pelaku upacara adat daerah, para penghayat dan para pendidik sejarah budaya	1 Tahun	220.550.000
2	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap THME	Kab. Kediri	Terlaksananya kegiatan pembinaan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME	1 Kali	30.200.000	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap THME	Kab. Kediri	Terlaksananya kegiatan pembinaan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME	1 Kali	37.020.000
VI	Pengelolaan Kekayaan Budaya				446.570.000	Pengelolaan Kekayaan Budaya				446.570.000
1	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Kab. Kediri	Terlaksananya pengelolaan & pelestarian benda-benda bersejarah dan purbakala	4 Kegiatan	256.320.000	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Kab. Kediri	Terlaksananya pengelolaan & pelestarian benda-benda bersejarah dan purbakala	4 Kegiatan	256.320.000
2	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Kab. Kediri	Terlaksananya pembinaan seniman & kelompok kesenian & kegiatan pagelaran kesenian	4 Kegiatan	190.250.000	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Kab. Kediri	Terlaksananya pembinaan seniman & kelompok kesenian & kegiatan pagelaran kesenian	4 Kegiatan	190.250.000
VII	Pengelolaan Keragaman Budaya				911.280.000	Pengelolaan Keragaman Budaya				911.280.000
1	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kab. Kediri	Terlaksananya Kegiatan Parade Budaya & Kesenian	5 Kegiatan	911.280.000	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kab. Kediri	Terlaksananya Kegiatan Parade Budaya & Kesenian	5 Kegiatan	911.280.000

VIII	Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya				353.019.750	Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya				353.019.750
1	Fasilitasi Pembentukan Kemitraan Usaha Profesi Antar Daerah	Kab. Kediri	Terlaksananya kegiatan pagelaran seni luar drh	8 Kegiatan	353.019.750	Fasilitasi Pembentukan Kemitraan Usaha Profesi Antar Daerah	Kab. Kediri	Terlaksananya kegiatan pagelaran seni luar drh	14 Kegiatan	353.019.750
IX	Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1.300.000.000	Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1.350.000.000
1	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Kab. Kediri	Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata	3 Kegiatan	150.000.000	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Dlm & Luar Kab. Kediri	Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata	1 Tahun	150.000.000
2	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam & di Luar Negeri	Kab. Kediri	Terlaksananya berbagai bentuk kegiatan promosi pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri	6 Kegiatan	950.000.000	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam & di Luar Negeri	Dlm & Luar Kab. Kediri	Terlaksananya berbagai bentuk kegiatan promosi pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri	1 Tahun	990.000.000
3						Operasional dan Pemeliharaan Website pariwisata	Kab. Kediri	Terlaksananya pemeliharaan website pariwisata	1 Tahun	10.000.000
4	Promosi Pariwisata Melalui Pelaku Industri Pariwisata	Kab. Kediri	Terlaksananya berbagai pertemuan dlm rangka promosi pariwisata dengan berbagai Pelaku Industri Pariwisata (PIP)	4 Kegiatan	200.000.000	Promosi Pariwisata Melalui Pelaku Industri Pariwisata	Dlm & Luar Kab. Kediri	Terlaksananya berbagai pertemuan dlm rangka promosi pariwisata dengan berbagai Pelaku Industri Pariwisata (PIP)	4 Kegiatan	200.000.000
X	Pengembangan Destinasi Pariwisata				16.238.262.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata				15.172.680.000
1	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	Kab. Kediri	Tercukupinya kebutuhan operasional kegiatan di Obyek Wisata	9 Obyek Wisata	1.218.552.000	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	Kab. Kediri	Tercukupinya kebutuhan operasional kegiatan di Obyek Wisata	9 Obyek Wisata	595.600.000

2	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Kab. Kediri	Terlaksananya pening-katan (pembangunan) sarpras pariwisata	6 Kegiatan	14.727.000.000	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Kab. Kediri	Terlaksananya pening-katan (pembangunan) sarpras pariwisata	10 Kegiatan	14.291.630.000	
3	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Kab. Kediri	Terlaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pengembangan daerah sbg tujuan wisata	3 Kegiatan	207.710.000	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Kab. Kediri	Terlaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pengembangan daerah sbg tujuan wisata	5 Kegiatan	195.450.000	
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Kab. Kediri	Terlaksananya pemeliharaan sarpras obyek wisata	8 Kegiatan	85.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Kab. Kediri	Terlaksananya pemeliharaan sarpras obyek wisata	7 Kegiatan	90.000.000	
XI	Pengembangan Kemitraan				545.810.000	Pengembangan Kemitraan				826.635.000	
1	Pengembangan SDM di Bidang Kebudpar Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya	Kab. Kediri	Terlaksananya berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan SDM Kepariwisataaan	4 Kegiatan	545.810.000	Pengembangan SDM di Bidang Kebudpar Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya	Kab. Kediri	Terlaksananya berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan SDM Kepariwisataaan	4 Kegiatan	826.635.000	
XII	Program Peningkatan dan Pemberdayaan melalui PKK				45.600.000	Program Peningkatan dan Pemberdayaan melalui PKK				57.500.000	
1	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja 2	Kab. Kediri	Terlaksananya keg. Pem berdayaan masyarakat melalui Pokja 2	1 Kegiatan	45.600.000	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja 2	Kab. Kediri	Terlaksananya keg. Pem berdayaan masyarakat melalui Pokja 2	1 Kegiatan	57.500.000	
TOTAL PAGU INDIKATIF					20.836.562.000	TOTAL PAGU KEBUTUHAN SATKER					20.820.505.000

Sumber: RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kediri Tahun 2016

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perumusan tujuan dan sasaran dapat dilakukan setelah terdapat evaluasi capaian kinerja dan penyesuaian RKPD dan renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri. Perumusan tujuan dan sasaran dalam proses penyusunan Renja SKPD ini digunakan untuk perumusan dan program kegiatan, indikator kinerja yang dimana usulan program. Dalam perumusan program dan kegiatan, indikator kinerja dari masyarakat yang dilakukan melalui forum musrenbang oleh dinas dapat diketahui melalui percakapan yang dilakukan oleh peneliti pada kamis 09 februari 2017 pukul 13.00 dengan Ibu Wiwiwk Puspita Sari sebagai berikut:

“Dalam hal ini kami membuat indikator-indikator sebelum melakukan usulan program kegiatan yang akan dibawakan pada saat forum musrenbang dengan masyarakat. setelah adanya usulan program dan kegiatan ini kami bisa membuat rancangan Renja SKPD berdasarkan isu strategis”.

Berikut adalah isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri:

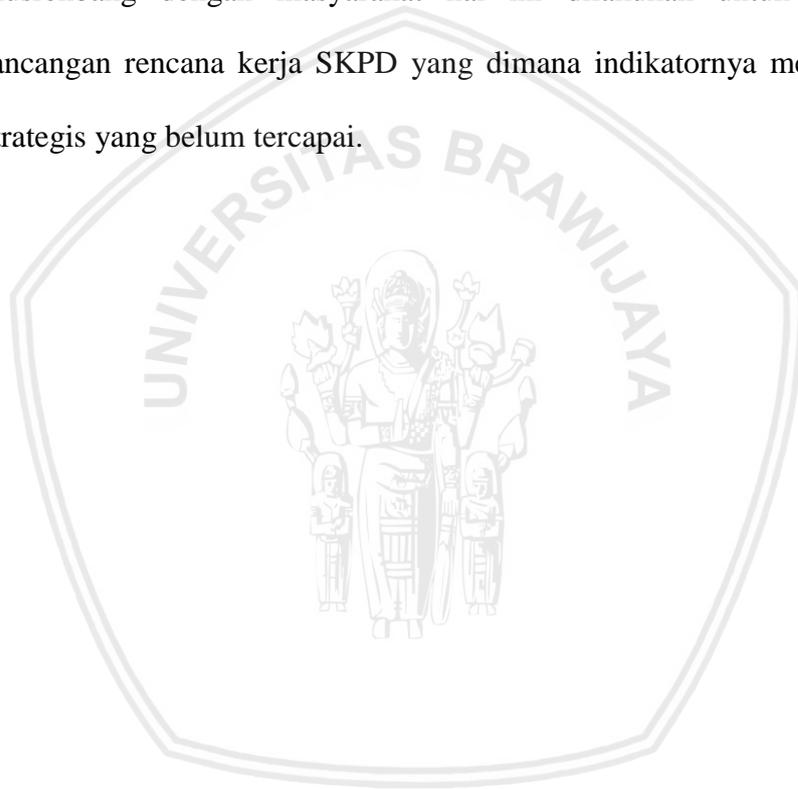
Kabupaten Kediri dengan keanekaragaman budaya dan potensi seni budaya yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan serta potensi pariwisata yang kompleks meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus sudah cukup mampu mengembangkan dirinya sebagai destinasi utama berskala nasional dalam hal kunjungan wisata. Ini dapat dibuktikan dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Untuk mewujudkan tersebut, ada beberapa isu-isu penting yang perlu mendapatkan perhatian, tanggapan serta tindaklanjut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Kediri, yaitu :

- a) Perlunya memperkuat jatidiri bangsa karena semakin deras arus globalisasi di dorong kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membuka peluang terjadinya interaksi budaya antar bangsa sehingga berpengaruh terhadap perkembangan dan perubahan orientasi nilai dan perilaku masyarakat
- b) Keragaman seni budaya dan tradisi merupakan hasil karya budaya perlu dipelihara, dilindungi, dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat. Pengembangan seni budaya dan tradisi memiliki peranan penting dalam meningkatkan apresiasi masyarakat dari generasi ke generasi terhadap keragaman budaya yang adaptif terhadap pengaruh budaya global.
- c) Pengelolaan warisan dan peninggalan budaya perlu upaya peningkatan dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pelestariannya sebagai sarana rekreasi, edukasi dan pengembangan kebudayaan.
- d) Kesiapan destinasi pariwisata di Kabupaten Kediri sebagai destinasi unggulan, untuk menciptakan pariwisata yang berdaya saing.
- e) Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata

- f) Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumber daya manusia bidang kebudayaan dan kepariwisataan.

Maka dalam pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang terdapat pada acara musrenbang yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri telah dibuat sebelum adanya musrenbang dengan masyarakat hal ini dilakukan untuk menyusun rancangan rencana kerja SKPD yang dimana indikatornya mengenai isu strategis yang belum tercapai.



b. Tahapan Penyusunan Rancangan RENJA

Tahapan rancangan rencana kerja SKPD adalah tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam penyusunan rancangan awal renja SKPD dapat diketahui pada Kamis 09 Februari 2017 pukul 13.00 melalui pernyataan Ibu Wiwik Puspita Sari sebagai berikut:

“jadi dalam rancangan rencana kerja SKPD ini kami menyingkronkan dengan kebijakan nasional dan provinsi. Setelah itu kami melakukan musrenbang pada tingkat desa dan tingkat kecamatan, hal ini dilakukan dengan tujuan penyempurnaan rancangan rencana kerja SKPD dengan forum yang akan dilakukan dengan masyarakat”.

Dari pernyataan Ibu Wiwik di atas dapat disimpulkan bahwa rancangan RENJA SKPD merupakan output dari pembahasan atau telaah awal yang ada dalam forum SKPD dinas yang dimana belum terjadi interaksi dengan masyarakat dalam pembuatan program dan kegiatan untuk kegiatan tahunan yang dimana rancangan renja SKPD awal ini hanya disinkronkan dengan Renstra SKPD. Setelah sinkronisasi ini terjadi maka materi perumusan rancangan renja SKPD yang dimuat dijelaskan oleh Ibu Wiwik Puspita Sari sebagai berikut:

“Dalam perumusan rancangan Renja SKPD ini memuat antara lain perumusan substansi dan penguangan hasil perumusan substansi ke dalam sistematika dokumen. Materi dalam penyusunan renja ini antara lain pengolahan data & informasi, analisis gambaran pelayanan SKPD, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, telaahan terhadap rancangan awal RKP, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas. Setelah itu kami menjadikan perumusan tadi sebagai penyajian yang sistematis. Penyajian sistematis ini akan kami gunakan sebagai penyajian data pada forum musrenbang”

Dari pernyataan diatas maka dalam perumusan rancangan renja SKPD memuat telaah yang berisikan pendahuluan, evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, tujuan sasaran program dan kegiatan serta penutup. Penyajian tersebut akan dijadikan sebagai penyajian data saat forum musrenbang dilakukan.

c. Pelaksanaan Forum Musrenbang

Dalam tahapan selanjutnya dalam proses penyusunan renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri adalah penyempurnaan rancangan Renja. Penyempurnaan rancangan awal Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri dijelaskan pada kamis 09 februari 2017 pukul 13.00 oleh Ibu Wiwik Puspita Sari sebagai beriku:

“Dalam penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kami melakukan forum musrenbang dengan tingkat masyarakat desa terlebih dahulu, kemudian kami juga melakukan forum musrenbang tingkat kecamatan. Dalam forum ini kami menjabarkan apa yang telah kami buat dalam rancangan awal rencana kerja Dinas”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui setelah dilakukannya rancangan renja yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka dilakukan penyempurnaan renja dimana penyempurnaan ini melalui forum diluar skpd yaitu dengan masyarakat tingkat desa dan kecamatan. Dalam pelaksanaan forum musrenbang tingkat desa Bapak Agus selaku Kepala Desa Bulupasar Kec. Pagu Kab. Kediri bidang sosial budaya dan Bidang kemasyarakatan mengatakan:

“Dalam forum musrenbang tingkat desa yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ya ngono kae mas mung mencari

keaktifitas warga untuk usulan program dan kegiatan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan potensi kesenian yang akan ditindak lanjuti dinas. Masyarakat kebanyakan meminta alat kesenian dan pembinaan seperti jaranan, gamelan, seragam bantengan, rehap pendopo dll”

Berikut adalah hasil usulan program dan kegiatan yang diperoleh dari masyarakat melalui forum musrenbang:

Dari pernyataan Bapak Agus selaku Kepala Desa Bulupasar Kecamatan Pagu tersebut dapat diketahui program dan kegiatan musrenbang yang dilakukan di tingkat desa merupakan dasar dari usulan program yang akan ditindak lanjuti pada tingkat kecamatan. Berkaitan dengan musrenbang tingkat kecamatan **Bapak Budi Hermanto** memaparkan pada hari jum'at 10 februari 2107 pukul 10.00 sebagai berikut:

“Jadi setelah kami mendapatkan usulan program dan kegiatan yang dilakukan di setiap desa yang ada di Kabupaten Kediri, kami melakukan pemilahan usulan melalui forum musrenbang tingkat kecamatan. Kami memilah ini karena jumlah usulan yang diberikan oleh masyarakat di tingkat desa terlalu luas, pemilahan ini berdasarkan visi misi kecamatan yang dimana menunjang program dan usulan kegiatan. Dalam musrenbang tingkat kecamatan ini akan kami bawa ke tingkat Kabupaten.”

Berikut data tabel usulan forum musrenbang tingkat kecamatan :

Tabel. 4.4 Usulan Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan di Kab. Kediri
2017

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1.	Kec. Gurah			
a.	Pengadaan sarana dan prasarana jaranan	Ds. Besuk dan Turus		
2.	Kec Plemahan			
a.	Perlengkapan jaranan	Ds. Bogokidul	1 kelompok	
b.	Perlengkapan jaranan	Ds. Wonokerto	1 kelompok	
3.	Kec. Tarokan			
a.	Bantuan dan pembinaan peralatan kesenian jaranan	Ds. Kerep	1 paket	
b.	Bantuan dan pembinaan peralatan kesenian jaranan	Ds. Kaliboto	4 paket	
c.	Bantuan dan pembinaan peralatan gamelan	Ds. Kalirong	1 paket	
4.	Kec. Badas			
a.	Peralatan Drum Band	Ds. Krecek	1 paket	
b.	Alat kesenian tradisional	Ds. Canggu	1 paket	
5.	Kec. Kandat			
a.	Pengembangan daerah wisata dan penghijauan sumber mata air	Ds. Purworejo		
b.	Pelatihan border dan menjahit	Ds. Ngletih		
c.	Pembangunan TPQ	Ds. Kandat		
5.	Kec. Pare			
a.	Pengadaan alat gamelan	Ds. Sumberbendo	1 paket	

b.	Pembinaan grub jaranan	Ds. Sambirejo	1 paket	
c.	Pengadaan seragam bantengan	Ds. Gedangsewu	3 kelompok	
6.	Kec. Semen			
a.	Pembinaan kesenian	Ds. Bobang	4 kelompok	
b.	Pengembangan wisata	Kawasan wisata sumber podang	1 unit	
7.	Kec. Pagu			
a.	Peningkatan sarana seni kuda lumping	Ds. Wonosari, kambangan, bulupasar, tanjung dan menang		
8.	Kec. Kepung			
a.	Pengembangan desa wisata	Ds. Besowo		
b.	Peralatan kuda lumping	Ds. Senowo, kencong, kepung, kebonrejo, brumbung	4 unit/ set lengkap	
9.	Kec. Puncu			
a.	Pelestarian budaya kesenian daerah	Wilayah Kec. Puncu	10 desa	
10.	Kec. Kras			
a.	Pengadaan alat karawitan	Ds. Setonorejo, Ds. Kanigoro		
b.	Peralatan jaranan	Ds. Mojosari, Ds.		

		Nyawangan, Ds. Kradang		
11.	Kecamatan Kandangan			
a.	Pengadaan Rest Area penunjang desa wisata	Ds. Medowo		
12.	Kec. Mojo			
a.	Pelatihan Batik	Ds. Surat, Pamongan, Mojo	2 kelompok	
13.	Kec. Ringinrejo			
a.	Pembinaan kesenian jaranan	Ds. Purwodadi, Deyeng, Dwung	3 kelompok	
14.	Kec. Ngancar			
a.	Peralatan kesenian kudalumping	Ds. Babadan, Ds. Sempu	2 grup	

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan wawancara pada jum'at 10 februari 2017 pukul 10.00 dengan Pak Toni selaku staf bidang data Bappeda dapat diketahui usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada forum musrenbang tingkat desa akan dipilah sesuai dengan visi dan misi kecamatan, yang akan ditindak lanjuti melalui forum musrenbang tingkat Kabupaten. Dalam forum musrenbang tingkat Kabupaten Pak Toni mengatakan:

“Dari program yang telah dipilah pada forum kecamatan akan ditindak lanjuti di forum musrenbang tingkat kabupaten. Dalam forum tingkat kabupaten ini usulan program yang telah dipilah di tingkat kecamatan dipilah lagi dengan kategori yang mengacu pada indikator indikator yang telah dibuat oleh dinas dan akan dilakukan pembahasan Renja SKPD”.

Dari beberapa wawancara diatas menunjukkan bahwa adanya forum musrenbang tersebut bertujuan untuk menyaring apa yang dibutuhkan

masyarakat dalam program yang akan dilaksanakan oleh Dinas. Setelah adanya penyempurnaan rancangan Renja SKPD maka kegiatan selanjutnya adalah pembahasan Renja SKPD pada forum, pernyataan ini didukung oleh ibu Wiwik Puspita Sari sebagai berikut:

“Setelah kami mengadakan forum bersama masyarakat dengan tujuan mendapatkan usulan kegiatan yang akan dilakukan dengan masyarakat kami melakukan pembahasan dalam forum skpd. Hal ini bertujuan untuk membahas dan memilah usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang sesuai dengan tujuan visi misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata”

Wawancara diatas dapat diartikan bahwa pembahasan yang dilakukan dalam forum skpd merupakan pemilahan usulan program yang diberikan oleh masyarakat yang akan mempengaruhi program yang akan disusun menjadi rancangan Renja SKPD. Tahapan penyesuaian Rancangan Renja SKPD dijelaskan pada senin 13 februari 2017 pukul 10.00 oleh ibu Wiwik Puspita Sari sebagai berikut:

“Jadi setelah terdapat pembahasan renja setelah terjadi penyempurnaan dimana terdapat usulan program yang diberikan oleh masyarakat kami menyesuaikan rancangan dan menyampaikan kepada bappeda Kabupaten Kediri”.

Dalam pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan tahapan penyesuaian rancangan renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri merupakan tahapan dimana terjadi sinkronisasi program dan kegiatan antara SKPD dengan masyarakat. Setelah adanya penyesuaian rancangan tersebut dikomunikasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri. Pernyataan tersebut diperkuat pada senin 13 februari 2017 pukul 13.00 oleh Ibu Yuli selaku Staf Bidang Data sebagai berikut:

“Iya mas benar jadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri mengomunikasikan rancangan renja setelah dilakukannya pembahasan renja pada tingkat Kabupaten hal ini ditujukan untuk mensinkronkan capaian dulu dengan program dan kegiatan yang akan dijadikan rancangan RKPD”.

Pernyataan dalam wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya dalam pembuatan renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kediri melakukan komunikasi perencanaan yang dibuat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri. Setelah adanya komunikasi dan sinkronisasi rancangan Renja awal dengan RKPD maka tahapan selanjutnya yaitu musrenbang RKPD. RKPD merupakan Rancangan Kegiatan Pemerintah Daerah

d. Penetapan RENJA SKPD

Tahapan terakhir dalam proses pembuatan renja yaitu tahap dimana renja yang telah dibuat ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Bupati Kabupaten Kediri pernyataan ini didukung oleh ibu Wiwik Puspita Sari pada senin 13 februari 2017 pukul 10.00 sebagai berikut:

“Setelah kami menyusun renja dan melakukan forum bersama masyarakat, kami menyesuaikan usulan program dan menjadikannya kedalam sebuah dokumen perencanaan yang sistematis. Dokumen ini selanjutnya kami berikan kepada bupati untuk ditinjau ulang dan jika sudah sesuai maka rancangan renja ini ditetapkan sebagai renja tahun 2017”.

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan renja dinas dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kediri. Berikut adalah dokumentasi yang mendukung pernyataan tersebut,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Surat Keputusan Kepala Disbudpar tentang Rencana Kerja (Renja) Perubahan Disbudpar Kabupaten Kediri Tahun 2016.
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Disbudpar Kabupaten Kediri Tahun 2016 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Kerja Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA digunakan sebagai acuan bagi Disbudpar Kabupaten Kediri dalam penyelenggaraan program kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Kediri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 3 - 08 - 2016

**KEPALA DISBUDPAR
KABUPATEN KEDIRI**

D. SAMPURNO

Gambar 4.1 Formulir Penetapan Kinerja atau penetapan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri.

Sumber : Arsip Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri 2016

e. Aktor yang terlibat dalam Penyusunan Renja

Aktor dalam penyusunan renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri tentunya tidak hanya dari Dinas yang bersangkutan saja. Aktor yang terlibat dalam proses penyusunan renja ini antara lain yaitu Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri serta Masyarakat. Pernyataan ini diperkuat oleh penjelasan ibu Wiwik Puspita Sari pada Kamis 09 Februari 2017 pukul 13.00 sebagai berikut:

“Mengetahui aktor yang terlibat dalam proses penyusunan rencana selain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu ada aktor lain yaitu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan masyarakat”.

Pernyataan di atas menyebutkan bahwa selain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdapat aktor lain yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini diperkuat oleh Ibu Yuli pada Senin 13 Februari 2017 sebagai berikut:

“Iya mas kami (BAPPEDA) memang merupakan aktor yang terlibat dalam pembuatan rencana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri. Peran kami dalam proses penyusunan rencana tersebut sebagai pelaksana musrenbang tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, serta pengoreksi untuk rancangan rencana sebelum ditetapkan”.

Pernyataan di atas memberikan pengertian bahwa BAPPEDA merupakan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan forum untuk penyempurnaan rencana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan peran sebagai pengoreksi rancangan rencana dan pelaksanaan forum musrenbang yang dilakukan dengan masyarakat. Maka dalam pembuatan rencana terdapat aktor lain yang ikut dalam prosesnya yaitu masyarakat. terkait aktor masyarakat Ibu Yuli menyatakan:

“Dalam pembuatan rencana dinas kami juga melibatkan masyarakat untuk ikut berperan serta. Peran masyarakat ini kami lakukan dengan cara menjangkau aspirasi masyarakat atau (jasmara) dimana hal ini akan menjangkau masukan-masukan masyarakat terkait program kerja yang akan mempengaruhi hasil dari rencana yang akan disusun oleh dinas”.

Pernyataan di atas dapat diartikan bahwa dalam proses pembuatan rencana melibatkan masyarakat dimana peran masyarakat ini disaring dan dilakukan

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan cara melakukan forum musrenbang dengan masyarakat.

Berikut tabel aktor yang terlibat dan penyusun Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri tahun 2017

Tabel. 4.5 Aktor-aktor yang terlibat dalam Proses Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kediri 2017

No	NAMA	Jabatan
1	Ir. Adi Suwignyo, M.Si	Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Yuli Marwantoko, SE., M.M.	Kabid. Sejarah & Purbakala
3	Zainal Arifin, S.P.	Kabid. Pengembangan
4	Patarina, S.Hut	Kabid. Kesenian & Plt. Sekretaris
5	Mudjiono, S.E.	Kasi. Pengembangan Kesenian
6	Suwasono	Kasi. Usaha hiburan & Kelembagaan
7	Dra. Ninik Yuniarsi	Kasi. Sejarah & Nilai Tradisi
8	Sabilarosad, S.T.	Kasi. Obyek & Daya Tarik Wisata
9	Puspita Dwi A, S.sos.,MM	Kasubag. Penyusunan Program
10	Eko Prianto Triwarso, S.S.	Kasi. Pelayanan Informasi & Kabid. Pemasaran
11	Nadlirin, S.H.	Kasi. Promosi Pariwisata
12	Eko Waskito Sukardi, SE	Kasubag. Keuangan
13	Dede Sujana S.sos. M.Si	Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Kediri

14	Masyarakat	Perwakilan setiap kecamatan
----	------------	-----------------------------

Sumber : Data Diolah Penulis

1. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat proses penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah faktor yang menyebabkan kegiatan yang berdampak positif. Dalam proses penyusunan renja dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten kediri terdapat faktor pendukung antara lain:

1) Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan renja adalah ikut memberikan usulan-usulan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui BAPPEDA. Usulan ini diketahui dari adanya musrenbang yang dilakukan oleh BAPPEDA, pernyataan ini diperjelas oleh Bapak Agus selaku Kepala Desa Bulupasar Kec. Pagu sebagai berikut:

“Kami ikut terlibat dalam pembuatan renja mas. Keterlibatan kami yaitu saat terjadi musrenbang yang dilakukan oleh BAPPEDA kami memberikan usulan. Usulan terkait dengan seni budaya kami memberikan salah satunya yaitu meminta bantuan alat kesenian berupa seragam jaranan, gamelan, lalu pelatihan-pelatihan”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat diketahui saat terjadi musrenbang yang diinisiasi oleh BAPPEDA. Usulan yang diberikan terkait seni dan budaya yaitu pelatihan-pelatihan, seragam jaranan dan gamelan. Pernyataan tersebut

didukung oleh ibu Yuli yang disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

“ya memang benar adanya begitu mas, masyarakat memang memberikan usulan seperti perlengkapan jaranan, gamelan dan pelatihan-pelatihan, namun itu tidak sepenuhnya bisa terealisasi karena tergantung prioritas dinas terkait yaitu disbudpar yang menanganinya, tapi biasanya usulan-usulan tersebut jarang juga terealisasi oleh dinas, terealisasi pun dialih tanggung jawabkan ke provinsi.”

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas bisa disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam forum musrenbang yang di inisiasi Bappeda lebih memberikan usulan-usulan yang sifatnya sulit terealisasi oleh kemampuan pemerintah kabupaten karena Bappeda melihat urgensi dari usulan tersebut dan pemerintah melalui Bappeda dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan solusi atau arahan untuk membantu melimpahkan usulan tersebut ke tingkat Pemerintah Provinsi.

Dengan terlibatnya masyarakat dalam proses penyusunan Renja tersebut diharapkan target yang direncanakan dapat sesuai dengan apa yang di butuhkan baik daerah maupun masyarakat itu sendiri sesuai potensi masing-masing daerah. Dengan terlibatnya masyarakat dalam kegiatan Pemerintah daerah tidak lain adalah untuk mencapai tujuan bersama.

2) Keterlibatan Bappeda

Keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran dan posisi yang strategis dalam proses

penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana pembangunan antar SKPD. Pernyataan ini diperjelas oleh Pak Jori Selaku kabid kemasyarakatan.

“Kami selaku Bappeda memang diberikan mandat dari bupati harus mampu melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan, terkait proses penyusunan renja SKPD kami hanya sebatas melakukan koordinasi ataupun fasilitator dalam mempertemukan antar SKPD, DPRD, Masyarakat, dan LSM untuk membahas usulan-usulan yang di utarakan masing-masing yang terlibat.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Bappeda dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah melibatkan Bappeda dan SKPD maupun *stakeholder* terkait. Bappeda sebagai unit yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan ini merumuskan rancangan awal dengan masukan dari rancangan rencana strategis dan rencana kerja SKPD tahun sebelumnya. Rancangan awal tersebut nantinya akan dibahas dalam kegiatan musrenbang.

Artinya Keterlibatan Bappeda ini merupakan suatu hal yang positif, karena secara tidak langsung Bappeda dapat menjembatani masyarakat untuk melibatkan diri dalam penyusunan Renja walupun hanya sebatas pengajuan usulan-usulan di tahap forum yang diperlukan bagi daerah yang memiliki potensi dalam hal ini bidang budaya dan pariwisata. Sehingga keterlibatan masyarakat dengan Bapendda

sudahlah sesuai dengan *stakeholder* sistem pemerintahan daerah yang di amanatkan dalam aturan yang berlaku.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor yang menjadi penghalang dari setiap kegiatan dan berdampak kearah yang lebih negatif. Setiap daerah memiliki permasalahan atau kendala yang berbeda-beda dalam penyusunan rencana pembangunannya. Dalam proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri terdapat faktor penghambat antara lain:

1) Rendahnya Kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat menjadi faktor yang mendukung dalam menjalankan suatu kegiatan. Munculnya rendahnya kesadaran masyarakat dikarenakan saat diadakannya musrenbang sering kali usulan-usulan dari masyarakat tidak terealisasi sesuai dengan keinginannya. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh Ibu Wiwik sebagai berikut :

“Masyarakat menjadi apatis dan enggan terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya dalam musrenbang desa, kecamatan sampai forum SKPD karena usulan masyarakat seringkali tidak bisa direalisasikan akibat terjadinya pemotongan/pemangkasan berbagai usulan, yang berdampak ketika setiap adanya pelaksanaan musrenbang yang bertujuan menyusun rencana kerja SKPD masyarakat menganggap hal tersebut yang hanya semata formalitas.”

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa dalam proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri besarnya usulan yang masuk seringkali lebih merupakan keinginan, bukan kebutuhan daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri, sehingga harus dilakukan pemilahan dan skala prioritas terhadap usulan yang masuk.

2) Rendahnya Keterbukaan Informasi

Faktor penghambat lain dalam penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri yaitu kurangnya keterbukaan informasi. Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Wiwik sebagai berikut :

“Dalam proses penyusunan rencana kerja kami membentuk anggota yang melibatkan dari berbagai bidang seperti bidang kebudayaan, kami ikut terlibat yang difasilitasi Bappeda, ya penghambatnya waktu pengumpulan data dan informasi dari masing-masing bidang terkadang selalu terlambat dan tidak sesuai dengan lapangan”.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kurangnya keterbukaan informasi antar bidang membuat terlambatnya proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri sehingga data yang terkumpul dengan memakan waktu lama pun tidak sesuai dengan realita lapangan, dan ini menjadi faktor penghambat baik untuk tahap selanjutnya serta tahap perealisasiannya.

C. Pembahasan

1. Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri tahun 2015

Menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari renstra SKPD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP), Renja SKPD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD.

Mengacu pada data yang diperoleh peneliti dalam proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri tahun 2015, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan penyusunan renja dengan tiga tahapan sebelum ditetapkannya rencana kerja yaitu tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan rencana kerja dan pelaksanaan forum SKPD, dengan mempertimbangkan peraturan menteri dalam negeri no 86 tahun 2017 lampiran VI tentang tahapan dan tatacara penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD) yang berisikan dalam

penyusunan rencana kerja SKPD memiliki beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan renja SKPD, penyusunan rancangan renja SKPD, pelaksanaan forum SKPD dan penetapan rencana kerja SKPD. Maka dalam kesesuaian tahapan penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri tahun 2015 telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 86 tahun 2017 lampiran VI. Pembahasan lebih jelas tentang proses dalam penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri tahun 2017 akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan Penyusunan Renja

Tahapan persiapan penyusunan rencana kerja SKPD diketahui pada lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2010 yang berisikan, Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Berikut adalah pembahasan secara terperinci dalam tahapan persiapan penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri tahun 2017:

1) Pembentukan Tim Penyusun

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri melakukan pembentukan tim penyusun berdasarkan kesesuaian bidang masing-masing untuk menggali data yang diperlukan. Dalam pembentukan tim

penyusun ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri dengan menimbang kesesuaian pendidikan serta pengalaman dalam penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Maka dengan menimbang data yang diperoleh peneliti dengan pedoman penyusunan rencana kerja SKPD dari Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 telah sesuai dan mencakup seluruh lapisan yang ada di dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri dan anggota berlatar belakang pendidikan yang mampu mengemban tugas dalam pembuatan rencana kerja serta berpengalaman dalam pembuatan rencana kerja. Bidang sosial budaya dan pariwisata dalam pembentukan tim penyusun ini diketahui yang diberikan tugas adalah Ibu Patarina, S.Hut, selaku kabid kesenian dan pernah menjabat sebagai sekertaris dan Bapak Mudjiono, SE., merupakan anggota tim penyusun pada bidang sosial dan budaya yang berlatar belakang sebagai Kasi Pengembangan Kesenian, maka dengan latar belakang tersebut sudah termasuk dalam kategori yang dimaksudkan dalam lampiran IV permendagri No 86 Tahun 2017 tentang anggota tim penyusun rencana kerja SKPD.

Mmenurut teori pembentukan tim oleh Ijul (2010), tim merupakan bentuk khusus dari kelompok kerja yang berbeda dengan kelompok kerja lainnya. Tim beranggotakan orang-orang profesional yang dikoordinasikan untuk bekerjasama demi mencapai sebuah tujuan dalam menangani sebuah tugas atau pekerjaan tertentu. Sedangkan

menurut Bruce Tackman (1965) tim dibentuk melalui beberapa tahapan antara lain Forming, Storming, Norming Performing, Adjouring dan Transforming.

Dengan mempertimbangkan teori tersebut maka dalam pembentukan tim kerja untuk penyusunan Renja SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri, kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri telah menjalankan dan melaksanakan sesuai dengan teori dimana tim Renja itu sendiri beranggotakan orang-orang profesional yang dikoordinasikan untuk bekerjasama yang dibentuk melalui beberapa tahapan Forming, Storming, Norming Performing, Adjouring dan Transforming untuk mencapai tujuan sebagai visi misi pemerintahan daerah.

2) Orientasi Mengenai rencana kerja SKPD.

Orientasi mengenai Renja SKPD perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja SKPD, hubungan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada bidang sosial, budaya dan pariwisata hal ini berguna untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang proses pembuatan renja serta hubungan renja dengan dokumen perencanaan yang lainnya. Analisa digunakan oleh peneliti dengan menimbang lampiran IV permendagri No 86 Tahun 2017.

Dapat diketahui dalam penyajian data bahwa orientasi pada bidang sosiasl, budaya dan pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri berupa fokus-fokus orientasi rencana kerja skpd tersebut berupa program pengembangan budaya, program pengelolaan kekayaan budaya, program pengelolaan keragaman budaya dan sebagainya dimana program tersebut merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mengacu pada dokumen perencanaan lain yaitu RKPD.

Sesuai dengan teori Setiadin dalam buku dasar-dasar teori perencanaan bahwa “rencana atau perencanaan selalu berorientasi pada kepentingan banyak atau publik”. Oleh karenanya, setiap kegiatan perencanaan harus menangkap mengolah, dan memenuhi aspirasi publik”. Artinya, segala kegiatan dan tindak tanduk suatu perencanaan dalam Pemerintahan dalam hal ini pemerintah daerah pastinya berdasarkan atas dan untuk kepentingan publik atau masyarakat daerah itu sendiri

3) Penyusunan Agenda Kerja

Penyusunan agenda kerja dalam kaitannya dengan tahapan persiapan pada proses penyusunan renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri, dapat diketahui dengan jangka waktu satu bulan. Waktu satu bulan ini dilakukan hanya untuk dalam tahapan penyusunan renja. Dapat diketahui dalam penyajian data agenda kerja juga dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk

melakukan forum pelaksanaan musrenbang dengan masyarakat yang akan dijelaskan pada sub bab pelaksanaan forum SKPD. Analisa yang digunakan oleh peneliti dengan menimbang lampiran IV permendagri No 86 Tahun 2017.

Analisa lain juga dapat menimbang pendapat dari Setiadi dalam buku dasar-dasar perencanaan yang mengatakan “terdapat perbedaan dalam penyusunan agenda kerja yang dimana terdapat dua alur yaitu teknokratis dan perencanaan demokratis atau sistem TOP DOWN ATAU BOTTOM UP. Apapun yang disusun atau dibuat oleh pemerintah (TOP) akan selalu merujuk untuk kepentingan masyarakat yang dinaungi oleh pemerintahan tersebut atau dengan kata lain, segala tindakan pemerintah itu merupakan aspirasi yang mewakili bawahannya atau masyarakatnya dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan mereka, sehingga pemerintah haruslah selalu siap dalam memfasilitasi bila mana ada kebutuhan yang belum terpenuhi, namun pemenuhan kebutuhan pula pastinya melalui berbagai prosedur dan proses sesuai ketentuan yang berlaku.

4) Penyiapan data dan informasi

Dalam pengumpulan data yang digunakan untuk penyusunan renja berupa data capaian pelayanan skpd baik berupa matrik yang dimana telah disajikan pada penyajian data. Dalam pengumpulan datanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri melalui

beberapa langkah yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 yang berisikan setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dipertanggung jawabkan. Data dan informasi ini dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Maka dalam tahapan pengumpulan data dan informasi ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri telah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 lampiran 1 mengenai tata cara pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri dibantu oleh BAPPEDA yaitu bidang sosial, budaya dan pariwisata dilakukan berdasarkan langkah-langkah, Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja SKPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan dalam analisis, Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan Renja SKPD, antara lain Peraturan perundang-undangan

terkait Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait, Dokumen-dokumen, RKPD provinsi dan Renstra SKPD provinsi untuk penyusunan Renja SKPD provinsi, RKPD kabupaten/kota dan Renstra SKPD kabupaten/kota untuk penyusunan Renja kabupaten/kota, Hasil evaluasi Renja SKPD periode lalu, Dokumen-dokumen RKPD, Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya, Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya, Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya, Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir dan Data khusus lainnya dari setiap SKPD yang dibutuhkan. Maka dalam tahapan ini data yang telah dikumpulkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah sesuai dengan Permendagri No 86 tahun 2017.

b. Tahapan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja

Tahapan penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2017, dalam penyusunan rancangan Renja terdapat tahapan awal yang dilakukan sebelum renja disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

membagi menjadi dua tahapan lagi yaitu tahap perumusan rancangan Renja SKPD dan tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Diketahui dalam penyajian data pada tahapan perumusan rancangan awal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri tahun 2017, melalui beberapa kegiatan. Kegiatan yang dilakukan antara lain pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPD, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, telaahan terhadap rancangan awal RKP, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD, penyempurnaan rancangan Renja SKPD, pembahasan forum SKPD dan penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM. Dalam tahapan ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan kegiatan yang disebutkan diatas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 86 tahun 2017.

Dapat diketahui dalam tahapan penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri tahun 2017 terdapat kegiatan pengolahan data. Dalam tahapan ini data dasar didapatkan dari RKP yang data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan

permasalahan pelayanan SKPD, yang menyangkut aspek kondisi pelayanan SKPD, organisasi dan tatalaksana SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra SKPD, kondisi dan rencana tata ruang wilayah, peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan SKPD, data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan, rancangan awal RKPD tahun rencana, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat, informasi program dan kegiatan yang diusulkan (dari kabupaten/kota untuk penyusunan Renja SKPD provinsi dan dari kecamatan untuk penyusunan Renja SKPD kabupaten/kota), informasi lain terkait pelayanan SKPD.

Tahapan selanjutnya setelah data-data terkumpul yaitu analisis gambaran pelayanan SKPD. Pada tahapan ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri melakukan beberapa kegiatan dimana kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Penentuan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi. Untuk SKPD yang telah memiliki SPM dapat menggunakan indikator kinerja SPM, serta IKK berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2008.
- 2) Untuk SKPD yang belum memiliki SPM, selain menggunakan IKK, perlu juga dirumuskan indikator lain yang sesuai untuk mengukur

kinerja pelayanan SKPD berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan tersendiri;

- 3) Identifikasi tolak ukur/besaran indikator kinerja menurut SPM dan IKK atau hasil analisis kebutuhan, pada setiap jenis indikator;
- 4) Identifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra SKPD untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya;
- 5) Hitung realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan;
- 6) Berdasarkan kondisi target menurut Renstra SKPD dan capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, hitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan SKPD;
- 7) Berikan catatan penting hasil kajian antara target dan realisasi yang dicapai, serta rumusan proyeksi untuk tahun rencana.

c. Tahapan Pelaksanaan Forum

Dalam tahapan forum pelaksanaan proses penyusunan renja Dinas Kebudayaan dan pariwisata, terdapat aktor lain yang ikut terlibat yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kediri bidang

sosial, budaya dan pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri dan masyarakat dari lapisan paling bawah. Dalam tahapan ini BAPPEDA melakukan penjabaran rancangan renja kepada masyarakat, yang dimana dalam kegiatan ini mendapatkan usulan program dari masyarakat. Maka peneliti dapat melakukan analisa dengan menimbang pendapat dari Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (1996), suatu perencanaan memiliki beberapa pendekatan dalam prosesnya, anantara lain adalah proses perencanaan teknokrat, perencanaan partisipatif, perencanaan *top-down*, dan perencanaan *bottom-up*. Pelaksanaan forum musrenbang paling bawah terdapat pada musrenbang tingkat desa. Musrenbang tingkat desa ini bertujuan untuk mendapatkan masukan program untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui bidang sosial, budaya dan pariwisata Kabupaten Kediri. Dapat diketahui hasil dari musrenbang tingkat desa yang dilakukan menunjukkan bahwa masukan masyarakat masih tergolong secara kelompok tertentu yang memiliki keaneka ragaman usulan, hal ini dipilah kembali pada saat dilakukannya forum pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan. Musrenbang tingkat kecamatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyaring hasil dari musrenbang tingkat desa yang diseleksi menurut visi dan misi kecamatan yang bersangkutan. Selanjutnya setelah terjadi pemilahan usulan yang dilakukan pada tingkat kecamatan dilanjutkan ke forum tingkat kabupaten yang dimana usulan dari kecamatan dipilah lagi dan disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten Kediri. Maka dalam analisa peneliti diatas telah sejalan dengan pendapat dari Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (1996).

Adanya forum SKPD diatas menghasilkan keluaran yang digunakan oleh dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri untuk menyusun ulang dan mengkredibilitaskan kesesuaian renja dengan kondisi existing dengan cara menjaring aspirasi masyarakat, analisa peneliti menimbang Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yang berisikan: menyelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Kuningan, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD.

d. Tahapan Penetapan Renja

Dalam tahapan ini rancangan yang telah dievaluasi dengan menimbang pendapat dari masyarakat membutuhkan verifikasi lebih lanjut Sebelum ditetapkan, dimana kepala dinas kebudayaan dan pariwisata menyampaikan

rancangan akhir Renja kepada kepala bappeda yang kemudian Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja SKPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SKPD dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD yang telah verifikasi, untuk diajukan kepada daerah dalam rangka, memperoleh pengesahan. Pengesahan rancangan akhir Renja SKPD dengan peraturan kepala daerah paling lama 1 (satu) bulan, setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD tahun berkenaan ditetapkan. Penetapan Renja SKPD oleh kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPD disahkan oleh kepala daerah. Dengan ini, apa yang telah dilakukan Dinas dalam penetapan Renja SKPD tersebut sudah memenuhi syarat yang telah diatur dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 yang tertuliskan sehingga hasil dari pada tahap akhir yaitu penetapan dapat dikatakan sah dan berarti.

e. Aktor yang Terlibat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri

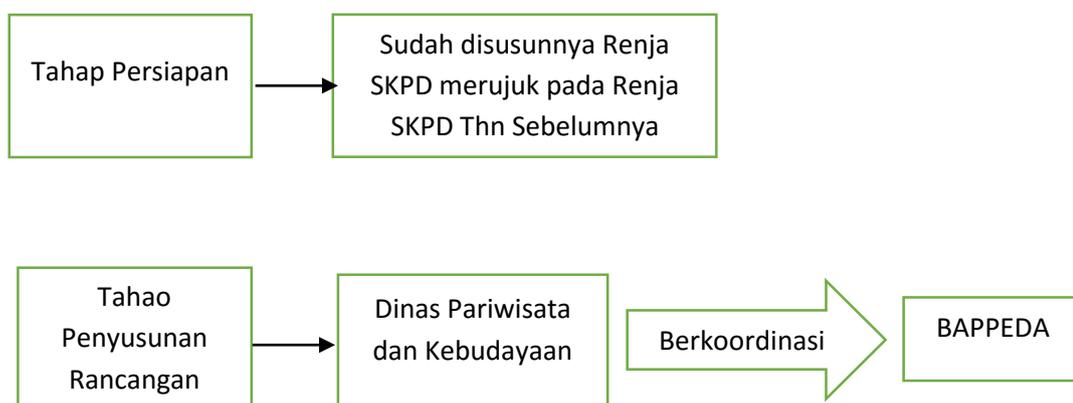
Dalam pembuatan Renja SKPD memang dibuat oleh dinas terkait, namun dalam proses pembuatannya perlu dilakukan penyempurnaan untuk menambahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh

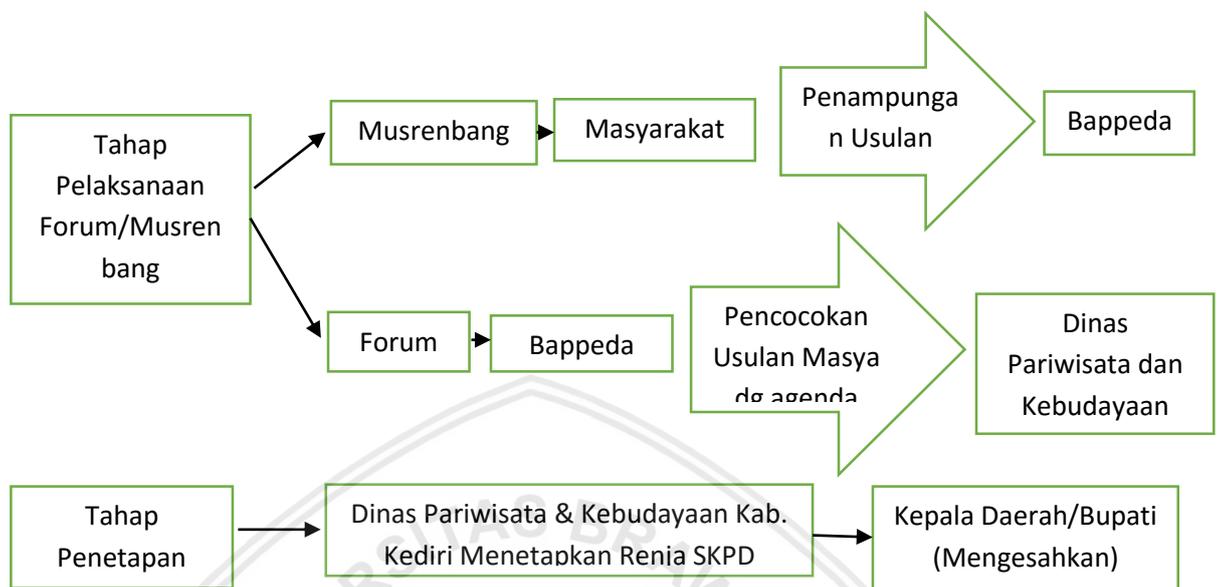
karenanya, dalam pembuatan renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu diulas dan dibahas siapa saja yang terlibat dalam proses penyusunan renja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui dalam pembuatan renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdapat aktor dari luar SKPD yang membantu, aktor tersebut adalah BAPPEDA dan masyarakat.

Adanya masyarakat dalam proses penyusunan renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata terjadi pada tahapan forum pelaksanaan musrenbang. Maksud dari adanya masyarakat dalam forum ini untuk memberikan masukan-masukan kepada Dinas terkait yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri. Perencanaan yang dilakukan dalam tahapan ini dapat dikategorikan sebagai perencanaan partisipatif yang sejalan dengan pendapat dari Mikkelsen (1999), partisipasi kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek (pembangunan), tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam tahapan ini masyarakat menjadi lebih peka terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas terkait. Dalam Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masyarakat memberikan kontribusi dimana kontribusi tersebut berupa penyediaan alat gamelan, jaranan dan lain-lain, maka dalam hal ini analisa menggunakan pendapat dari Mikkelsen (1999), Partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan.

Aktor lain dalam proses pembuatan renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri. Keterlibatan BAPPEDA dalam proses penyusunan renja

merupakan penyelenggara musrenbang dari tingkat Desa sampai ke Kabupaten. Dalam hal ini BAPPEDA melalui Bidang Sosial dan Budaya melakukan kegiatan untuk menjaring aspirasi masyarakat untuk dijadikan data sebagai penyempurna rancangan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri. Analisa ini menggunakan pembandingan melalui permendagri no 86 tahun 2017 yang mengatakan tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penetapan rancangan akhir Renja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan. Berikut adalah bagan aktor – aktor dalam tahap proses penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri :





Gambar 4.2 : Bagan aktor – aktor dalam tahap proses penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri

Artinya, dalam hal ini terkait aktor yang terlibat dalam proses penyusunan Renja SKPD adalah mereka-mereka yang dibentuk secara sah menurut aturan yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan daerah tersebut. Selain aktor dari pada struktural pemerintahan, masyarakat juga turut andil atau terlibat dalam proses penyusunan walaupun di tahap akhir pemerintahlah yang mengambil andil dalam pengambilan keputusan untuk pengesahannya.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Proses Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang menyebabkan kegiatan berdampak lebih positif. Dalam proses penyusunan renja Dins Kebudayaan dan Pariwisata memiliki faktor pendukung agar mendapatkan keluaran lebih baik. Adapun faktor pendukung dalam proses penyusunan renja tersebut antara lain:

1) Keterlibatan atau partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan. Partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa terlibat dan merasa bagian dari pembangunan. Hal ini akan sangat berdampak positif terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program pembangunan.

2) Bappeda

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor

86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa salah satu tahap yang harus dilakukan Bappeda Kabupaten Kediri dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan adalah melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam hal ini khususnya tentang mengenai proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri tahun 2017.

Dalam konteks ini Bappeda Kabupaten Kediri sudah melaksanakan dan menghimpun berbagai pihak SKPD, Anggota Dewan, LSM, dan perwakilan masyarakat setiap desa yang berkaitan dengan Musrenbang khususnya dalam proses penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri tahun 2017, sehingga Bappeda sendiri sudah menjalankan tugasnya untuk memenuhi atau mencapai tujuan pembangunan pemerintahan daerah.

3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pemantau dan pengendali maupun fasilitator dalam bidang kebudayaan dan pariwisata. Tugas pokoknya semua Instansi Pemerintah maupun Swasta

tentu memiliki peranan dalam pengendalian tugas pokoknya yang membedakannya adalah sejauh mana pengendalian itu dapat dilaksanakan agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah di sepakati bersama, berhasil atau tidaknya sebuah instansi tergantung dari seberapa besar pengendalian tugas dapat dilaksanakan. Begitupun dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang tertuang dalam pendirian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang membidangi masalah kebudayaan dan kebudayaan terutama dalam pelestarian budaya dan pengembangan budaya yang ada di daerah Kabupaten Kediri.

Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Pelaksana Teknis Pengembangan Seni Budaya Daerah. Dalam setiap instansi pemerintah pasti terdapat kebijakan yang menjadi tonggak dalam melaksanakan kegiatan yang ada kemampuan SKPD sebagai bagian dari pemerintah daerah harus mampu untuk melaksanakan kebijakan teknis pengembangan seni budaya daerah. Tanpa terkecuali Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang secara teknis memegang kebijakan mengenai pengembangan Seni Budaya Daerah.

Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja SKPD,

Dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata dan melestarikan keanekaragaman aset kebudayaan agar lebih berkualitas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri selaku

penanggung jawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah dalam bidang pariwisata dan kebudayaan, berkewajiban menyusun Rancangan Renja Kerja (RENJA) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan.

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka perbaikan, pembaharuan dan peningkatan kualitas pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang didalamnya memuat kebijakan, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan berpedoman arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah faktor yang menyebabkan kegiatan berdampak negatif yang mengganggu atau menghalangi suatu program, kegiatan atau kerjasama sehingga tidak terlaksana dengan baik. Dalam proses

penyusunan renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri memiliki faktor penghambat sebagai berikut:

1. Belum optimalnya jaringan kerjasama dan koordinasi antar sektor, dan masyarakat

Belum optimalnya jaringan kerjasama antar sektor yang dimaksud adalah kurangnya sumberdaya manusia yang terjun langsung ke lapangan dalam melihat kondisi dan menginput data yang ada dilapangan mengakibatkan antara masyarakat dengan pemerintah seolah-olah mempunyai jarak dalam memberikan informasi valid di lapangan. Selain itu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait program dan kegiatan yang akan disusun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata satu tahun kedepan, mengakibatkan ketika musrenbang beberapa usulan masyarakat belum bisa tertampung secara maksimal.

2. Pelaksanaan pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang yang belum maksimal.

Perencanaan pembangunan dibidang apapun sebagian besar masih didominasi oleh berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan kepala daerah, hasil reses DPRD, program dan kegiatan SKPD itu sendiri bahkan kepentingan dari elemen-elemen masyarakat. Hal ini telah banyak terlihat buktinya di lapangan, bahwa apa yang sudah di buat perencanaannya sesuai *matrix dan usulan yang berasal dari masyarakat (bottom up)* dengan

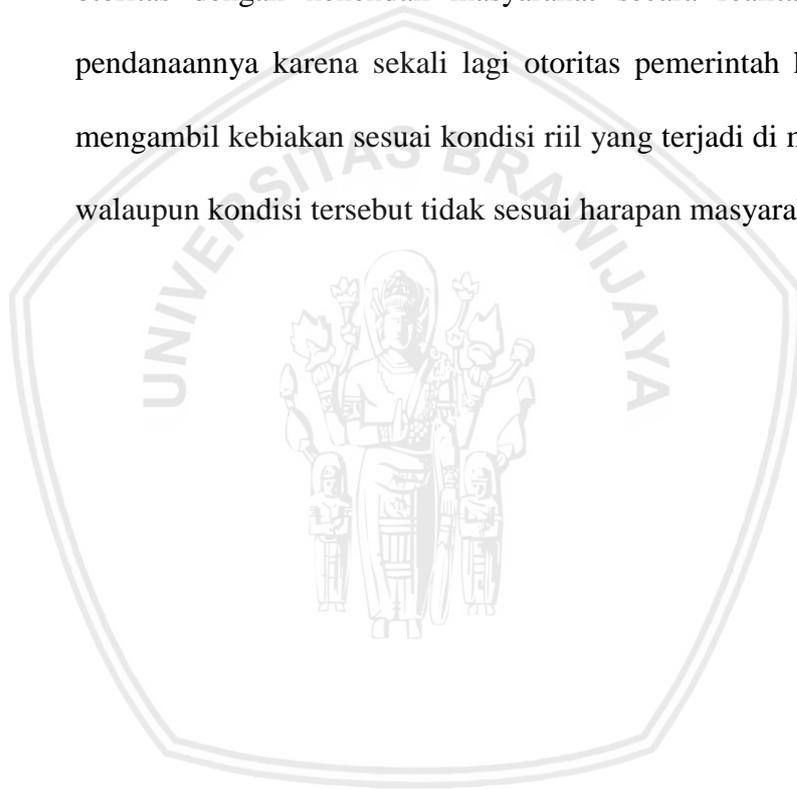
sebelumnya telah melalui proses penyusunan usulan program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan misalnya ternyata realisasinya sangatlah minim. Kondisi ini membuat pelaksanaan musrenbang menjadi acara rutinitas dan formalitas belaka sehingga menjadi kurang diminati oleh pihak-pihak yang selayaknya mengikuti kegiatan tersebut.

3. Adanya intervensi pada saat proses penyusunan perencanaan

Perencanaan suatu kegiatan terutama yang berkaitan dengan peningkatan pembangunan di semua sektor dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya diawali dengan perencanaan yang didasari oleh pedoman-pedoman yang ada termasuk rencana kerja yang telah disusun dalam jangka 1 (satu) tahun tanpa mengesampingkan isu-isu strategis yang ada selama masih berkaitan dan mempunyai output yang jelas. Akan sangat selaras ketika semua bisa mengacu pada pedoman yang ada dan akan sangat mudah nantinya dalam proses monitoring dan evaluasi. Namun jika perencanaan keluar dari pedoman-pedoman strategis yang telah ditetapkan maka daerah akan menemui kesulitan dalam menyusun perencanaan dan kegiatan tahun-tahun berikutnya.

4. Berbenturnya kebijakan politik kepala daerah dengan kehendak masyarakat yang berbeda

Proses perumusan kebijakan selalu melibatkan kondisi realita masyarakat yang sedang terjadi saat ini. Di mana pembahasan politik selalu berkaitan dengan kepentingan orang banyak yang didalamnya terdapat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selaku pemegang otoritas. Dalam hal ini, terjadinya perbenturan kebijakan otoritas dengan kehendak masyarakat secara realita ada pada pendanaannya karena sekali lagi otoritas pemerintah hanya akan mengambil kebijakan sesuai kondisi riil yang terjadi di masyarakat walaupun kondisi tersebut tidak sesuai harapan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri Tahun 2017 tentang program pengembangan seni budaya daerah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri:

a. Tahapan dalam proses penyusunan Renja SKPD Kabupaten Kediri:

1) Tahapan Persiapan Penyusunan

Dalam tahapan ini bidang sosial, budaya dan pariwisata juga melakukan kegiatan pengelolaan data dan informasi yang mengacu pada hasil dari evaluasi renja tahun 2016 dengan capaian kinerja dari laporan kinerja SKPD dan RKPD. Pengolahan data yang telah dianalisis akan menjadi isu permasalahan.

2) Tahap Penyusunan Rancangan Renja

Dalam tahap ini, rancangan RENJA SKPD merupakan output dari pembahasan atau telaah awal yang ada dalam forum SKPD dinas yang dimana belum terjadi interaksi dengan masyarakat dalam pembuatan program dan kegiatan untuk kegiatan tahunan yang dimana rancangan renja SKPD awal ini hanya disinkronkan dengan renstra SKPD.

3) Tahap Pelaksanaan Forum ¹⁵⁴ ng

Dalam tahap ini, dimulai dengan tahap penyesuaian rancangan renja yang dilaksanakan pada musrenbang, masyarakat akan mengajukan usulan-usulan sehingga musrenbang ini disebut dengan tahap pelaksanaan forum. Setelah adanya penyesuaian rancangan tersebut dikomunikasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri, Bappeda akan melakukan sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kediri kemudian melakukan komunikasi perencanaan yang dibuat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri.

4) Tahapan Penetapan SKPD

Tahapan terakhir dalam proses pembuatan renja yaitu tahap dimana renja yang telah dibuat ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Bupati Kabupaten Kediri. Dokumen yang disusun sesuai dengan usulan program yang terancang secara sistematis akan diajukan kepada Bupati selaku Kepala Daerah untuk ditinjau ulang, dan jika sudah sesuai tujuan rancangan maka Renja tersebut akan disahkan oleh Kepala Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagai Renja yang di agendakan

b. Aktor-aktor yang terlibat dalam Penyusunan Renja SKPD

Aktor dari pada proses penyusunan Renja SKPD tersebut adalah Bappeda, Masyarakat, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sendiri. Masyarakat memberi peran sebagai aktor yang memberikan masukan-masukan kepada pihak Dinas BAPPEDA menjalankan fungsi mereka sebagai *stakeholder* yang dengan fungsi tersebut mampu menjembatani masyarakat untuk berpartisipasi dalam tindakan pemerintahan daerah, sedangkan Dinas selaku pelaksana SKPD dan RKPD adalah sebagai aktor utama agar dilaksanakannya Renja SKPD, sehingga proses yang dimulai dari tahap awal hingga penetapan SKPD ditahap akhir Dinas tetaplah yang mengambil andil sebagai aktor prima dalam kegiatan ini.

2. Pelaksanaan proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri 2015 diwarnai dengan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri 2015 adalah sebagai berikut :
 - a) Faktor Pendukung

Keterlibatan masyarakat dalam forum ini untuk memberikan masukan-masukan kepada Dinas terkait yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri. Perencanaan yang dilakukan dalam tahapan ini dapat dikategorikan sebagai perencanaan partisipatif. Sedangkan BAPPEDA menjalankan fungsi mereka sebagai *stakeholder* yang dengan fungsi tersebut mampu

menjembatani masyarakat untuk berpartisipasi dalam tindakan yang pemerintahan daerah.

b) Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri 2015 juga terdapat beberapa faktor penghambat yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada pembangunan seni dan budaya dalam dokumen rencana kerja tahun 2015. Adapun faktor penghambat dalam proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri antara lain :

1. Belum optimalnya jaringan kerjasama dan koordinasi antar sektor, dan masyarakat
2. Pelaksanaan pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang yang belum maksimal.
3. Berbenturnya kebijakan politik kepala daerah dengan kehendak masyarakat yang berbeda

B. Saran

Secara umum proses penyusunan rencana kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri 2015 telah berjalan dengan maksimal. Namun masih terdapat beberapa permasalahan baik dalam proses penyusunan secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan

kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Menciptakan sinergitas antar sektor

Menetapkan sinergitas antar sektor sebagai upaya untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait program yang akan di susun SKPD untuk memberikan keterbukaan data dan informasi rencana kerja kedepanya dengan tujuan menciptakan kepedulian pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri. Hal ini penting guna membentuk usaha untuk melalui contact antar sektor sehingga semua sektor memberikan daya dukung masing-masing dalam usaha peningkatan Kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata Di Kabupaten Kediri.

2. Meningkatkan kualitas layanan berbasis informasi

Dengan kemajuan teknologi terkini kebutuhan semua pihak akan informasi menuntut pemerintah untuk berinovasi melalui layanan-layanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Ketersediaan layanan berbasis informasi dapat memberikan *impact* positif dalam usaha peningkatan pengembangan rencana-rencana program atau kegiatan kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Kediri

3. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana program yang akan dibentuk.

Atas dasar peningkatan sosialisasi masyarakat, maka kesadaran. Peranserta dan swadaya masyarakat perlu ditingkatkan agar partisipasi

masyarakat dalam pembangunan akan dirasakan sebagai suatu kewajiban bersama. Dalam hal ini, masyarakat bukan hanya berfungsi untuk memberi dukungan dan keikutsertaan saja dalam proses pembangunan tetapi juga menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- A.J, Muljadi. 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Bukart, A.J. dan Medlik, S. 1981. *Tourism :, Present and Future*. London : Heinemann.
- Cohen, Erik. 1974. *Who Is Tourist? A Conceptual Clarification*. *The Sociological Review*, 22 *The Hebrew University*.

- Handoko, H,T. 1999. *Manajemen. Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE
- H.B. Sutopo. 2006. *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga, Jakarta
- Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. (Penerjemah: Matheos Nalle). Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Miles, M.B., Huberman, A.M., Saldana, Jhonny. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Source Book*. SAGE Publication.
- Moleong, L, J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muljadi, Arif. 2006. *Pokok-pokok dan Ikhtisar Manajemen Strategik Perencanaan dan Manajemen Kinerja*. Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Pendit, Nyoman. 2002. *Ilmu Pariwisata : Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
- Pitana, I Gede. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta : ANDI
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Riyadi dan Bratakusumah, D,S., 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia
- Rogers, dkk. 2008. *An Introduction To Sustainable Development*. London: Glen Educational Foundation, Inc.
- Siagian, Sondang. P. 2005. *Administrasi Pembangunan , Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara

- Suryono, Agus & Trilaksono Nugroho. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Banyumedia
- Sulastianto, Harry (2006) . Seni Budaya untuk kelas IX Sekolah Menengah Pertama, Bandung : Grafindo Media Pratama.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tjokroamidjojo, B. 1989. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan dan Kebudayaan
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik Edisi 1, Cet. 2*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winardi. 1989. *Perencanaan dan Pengawasan dalam Bidang Manajemen*. Bandung: Mandar Maju
- Wursanto, Ig. 1987. *Pokok-pokok Perencanaan*. Jogjakarta: Kanisius.
- Yoeti, Okta A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa

CURRICULUM VITAE

Nama : M. Anas Azhary

Nomor Induk Mahasiswa : 125030607111013



Tempat, Tanggal lahir : Kediri, 05 Juli 1994

Pendidikan

1. SD Wanengpaten Kec. Gampengrejo Kab. Kediri, Lulus Tahun 2006
2. SMP 2 Gampengrejo Kab. Kediri, Lulus Tahun 2009
3. MAN 3 KOTA KEDIRI, Lulus Tahun 2012
4. S1 Ilmu Administrasi Publik, FIA Universitas Brawijaya, Lulus Tahun 2019

Pekerjaan : -

Karya Ilmiah : Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri





Lampiran



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 661/UN10.F03.11.11/PN/2017
Lampiran : -
Perihal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : M. Anas Azhary
Alamat : Wanengpaten, Kec. Gampengrejo Kab. Kediri
NIM : 125030607111013
Jurusan : Administrasi Publik
Minat : Perencanaan Pembangunan
Tema : **Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kediri 2015**

Lamanya : 17 Mei 2017 – 15 Juli 2017
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 10 Mei 2017

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Dr. Choirul Saleh, M.Si

NIP. 19600112 198701 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 1 TELEPON 689969
KEDIRI

Website : www.Kedirikab.go.id Email: bakesbangpol@kedirikab.go.id

Kediri, 28 Maret 2016

KEPADA
YTH. SDR. KEPALA DINAS BUDPAR
KABUPATEN KEDIRI
DI

Nomor : 070 / 171 / 418.62 / 2016
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Persetujuan Ijin Penelitian

KEDIRI

Menunjuk Surat Saudara Kepala Badan kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Maret 2016 Nomor : 070/3557/203.3/2016 perihal Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di maksud, yang akan dilaksanakan :

Nama : **M. ANAS AZHARY**
 Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Brawijaya Malang
 Alamat : Jl. Kh. Wakhid Hasyim 65 Kediri
 Bangsa : Indonesia
 Judul : *Efektivitas Pelaksanaan Rencana Kerja Disbudpar Kab. Kediri Tahun Anggaran 2015*
 Penanggung jawab : **Dr. Tjahjanulin Domai, MS**
 Waktu : 3 (tiga) bulan sejak tanggal rekomendasi diterbitkan
 Tempat : Dinas Budpar Kabupaten Kediri
 Peserta : -

Maka diminta Saudara memberikan jawaban tertulis, wilayah / Satker Saudara untuk dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan dimaksud, yang akan kami pergunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih

Catatan :

Instansi Disbudpar Kabupaten Kediri
 Nomor Registrasi Surat : 070 / 381 / 418.56 / 2016
 Tanggal : 11 April 2016
 Tidak keberatan / Keberatan

a.n Kepala Disbudpar Kab. Kediri



Umum dan Kepegawaian

BARASARI K., SE, M.M.

NIP. 19630105 199003 2 002

a.n. KEPALA BAKESBANGPOL
 KABUPATEN KEDIRI
 u.b. Kabid Kewaspadaan
 Kasubid Penanganan Konflik



M. ZAENAL ARIFIN, S.Sos
 Penata Tingkat I
 NIP. 19621122 199403 1 004

